

# RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN  
2017**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum, Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode tahun 2017-2022 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang maksimal.

Penggabungan Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan Dinas Kehutanan merupakan tantangan besar bagi pemerintah Provinsi Banten untuk mampu menjawab setiap tantangan dan permasalahan pembangunan, khususnya lingkungan hidup dan kehutanan, menuju masyarakat yang sejahtera.

Hal tersebutlah yang menjadi kebijakan mendasar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara sistematis, sinergis dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih luas melalui lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kab/Kota, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta permasalahan yang melingkupi dunia lingkungan hidup dan kehutanan saat ini. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi kepemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Untuk itu disusunlah **Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017-2022**.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan perubahan dinamika lingkungan sehingga Renstra yang disempurnakan dapat bertujuan positif kedepan dan dapat diandalkan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas SKPD Provinsi

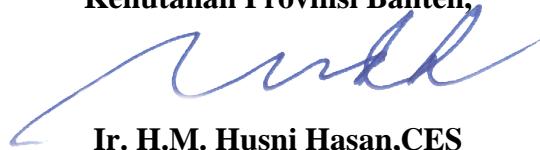
dan Kab /Kota. Dengan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017-2022 ini, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih konkret.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017-2022 ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan disertai dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan penyusunan, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada periode mendatang serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Serang, Desember 2017

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Provinsi Banten,**



**Ir. H.M. Husni Hasan, CES**

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19621222 199003 1 004

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vi</b>
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	10
1.3 Maksud dan Tujuan .....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>2. Gambaran Pelayanan SKPD .....</b>	<b>19</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	19
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah (SKPD) .....	42
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD/OPD .....	51
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD/OPD.....	58
<b>3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>61</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	61
3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	70
3.3 Telahan Renstra Kementerian LHK .....	78
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	83
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	111
<b>4. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.....</b>	<b>114</b>
4.1 Visi dan Misi SKPD/OPD .....	114
4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD/OPD .....	116
<b>5. Strategi Dan Kebijakan</b>	
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	122

<b>6. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....</b>	<b>132</b>
5.1 Program dan Kegiatan .....	132
5.2 Indikator Kinerja.....	134
5.3 Kelompok Sasaran .....	139
5.4 Pendanaan Indikatif .....	139
<b>7. Indikator Kinerja DLHK Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....</b>	<b>149</b>
<b>8. Penutup .....</b>	<b>154</b>

## **Lampiran**

- 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif**
- 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD Periode 2017 - 2022**
- 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra SKPD Periode 2017-2022**
- 4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Renstra SKPD Periode 2017 - 2022**
- 5. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**
- 6. Draft Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022**
- 7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD**
- 8. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra SKPD**
- 9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Renstra SKP**
- 10. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**
- 11. Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD**
- 12. Kawasan Hutan Provinsi Banten**
- 13. Data Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK Penetapan Parsial Provinsi Banten Tahun 2017**
- 14. Luas Kawasan Hutan dan Prosentase Fungsi Kawasan**
- 15. Mapping Sebaran Luas Hutan Rakyat (HR) di Provinsi Banten**
- 16. Mapping Sebaran Luas Lahan Kritis di Provinsi Banten Tahun 2017**
- 17. Peta Klasifikasi DAS Provinsi Banten**
- 18. Daerah Aliran Sungai DAS**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017 .....	42
Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017 ...	43
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten .....	44
Tabel 4. Jenis Aset dan Nilai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun .....	44
Tabel 5. Luas Kawasan Hutan di Propinsi Banten .....	46
Tabel 6. Rencana Kawasan Lindung Propinsi Banten Tahun 2010-2030 ....	48
Tabel 7. Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 .....	52
Tabel 8. Indikator Kinerja Kunci dan Capaiannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 .....	54
Tabel 9. Pencapaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Air .....	56
Tabel 10. Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Udara .....	57
Tabel11 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Analisis Faktor Internal (SW) .....	64
Tabel12 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi Kepala Daerah Terpilih dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan .....	75
Tabel13 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi KLHK dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan SKPD/POD .....	81
Tabel 14 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan RTRW & KLHS dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan SKPD/POD .....	104
Tabel 15 Penentuan Isu-isu strategis.....	111
Tabel 16 Visi dan Misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022.....	116
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2017-2022.....	117

Tabel 18 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten .....	118
Tabel 19 Strategi dan Kebijakan .....	124
Tabel 20 Kebijakan Umum dan Program .....	126
Tabel 21 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten .....	140
Tabel 22 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	152

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten .....	23
Gambar 2. Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten .....	43
Gambar 3. Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten .....	45
Gambar 4. Gambaran Luas Kawasan Hutan di Propinsi Banten .....	47
Gambar 5. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya .....	47
Gambar 6. Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Air tahun 2009-2016 di Provinsi Banten .....	56
Gambar 7. Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien tahun 2009-2016 di Provinsi Banten .....	57

# **BAB I**

### **1.1. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Sehingga baik buruknya kualitas lingkungan akan ditentukan oleh prilaku masyarakat disekitarnya juga. Maka dari itu, lingkungan yang sehat akan berdampak pada kesehatan masyarakat disekitarnya.

Selama ini terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia yang mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Artinya kalau salah satu komponen rusak maka akan mengganggu komponen yang lain karena dalam suatu lingkungan hidup berlaku sistem yang disebut dengan rantai makanan. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup manusia dihadapkan pada rangkaian permasalahan yang saling berkaitan. Rangkaian pokok permasalahan dalam lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemanfaatan daya alam yang semakin terbatas.

2. Grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak merata.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia.

Masalah lingkungan hidup dan kelestarian hutan ini telah lama menjadi bahasan masyarakat internasional, bahkan masalah ini akan menjadi isu berkepanjangan hingga akhir zaman. Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai suatu kesatuan ekosistem lahan yang berisi sumber daya alam hayati, hutan memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Setidaknya ada tiga alasan yang membuat kita harus melestarikan hutan: Pertama, setiap pohon besar mampu memproduksi 4.580 Kg oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1.058,5 kg/tahun. Jadi jika rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4.234 kg oksigen per tahunnya. Ini bisa dipraktekan dengan menanam 1 pohon besar dipekarangan rumah kalian tentunya kebutuhan oksigen tercukupi dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Kedua, setiap pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 unit ac yang dioperasikan selama 20 jam/hari. Ketiga, setiap hektar hutan dapat menetralisir karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang diakibatkan oleh 20 kendaraan bermotor. Setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu, asap, aerosol, dll) dan mengolahnya menjadi humus.

Namun pada kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi rusaknya hutan di Indonesia, seperti pengusahaan hutan yang dilakukan secara tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Kemudian juga tidak adanya kesadaran untuk menanam kembali hutan yang sudah diusahakan/dikelola. Belum lagi adanya inefisiensi yang sering kali terjadi mulai dari penebangan sampai kepada pemakaiannya. Selain itu, sebagian besar jenis kayu yang tumbuh di hutan adalah jenis kayu yang sangat laku di pasaran. Hal ini akan meningkatkan tingkat eksploitasi jenis kayu tersebut di hutan. Semakin tinggi permintaan akan kayu, maka tingkat eksploitasi akan semakin besar, sehingga peluang terjadinya kerusakan hutan akan semakin besar pula.

Upaya pencegahan kerusakan hutan harus lebih digencarkan untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan, khususnya hutan di kawasan Provinsi Banten. Upaya pelestarian hutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di areal sekitar hutan. Di satu sisi masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan, disisi lain manfaat ekologi dan sosial juga dapat dioptimalkan. Sehingga hutan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat dimanfaathan hingga generasi yang akan datang. Hal ini seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah dideklarasikan organisasi-organisasi ditingkat internasional.

Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi golongan tertentu tapi juga memperhatikan

keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lain. Adapun keadilan berarti pencapaian pembangunan di satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada beberapa dekade terakhir, telah menjadi mainstream pembangunan, dimana banyak negara di dunia telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, baik pada level lokal (daerah),nasional hingga pada level internasional. Keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi elemen inti (*core element*) bagi banyak kebijakan negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga strategis lainnya (Ekins dan Simon 2001).

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 oleh *World Comission on Environment and Development (Brundtland Comission)* salah satu komisi United Nation (PBB), melalui buku *Our Common Future*. WCED (1987) mendefinisikan *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dalam arti harfiahnya dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tataran implementasi di Indonesia, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU RI No.32 tahun 2009). Lebih jauh Munasinghe (1993) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yakni;

ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social equity*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological sustain*). Menurut Serageldin (1996) suatu kegiatan pembangunan (termasuk pengelolaan sumber daya alam dan berbagai dimensinya) dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi, ekologi, dan sosial bersifat berkelanjutan.

Meskipun banyak variasi definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, namun pada intinya mencakup dan bertumpuh pada tiga aspek/pilar utama yakni; ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe 1993). Dengan kata lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi (*profit*), keberlanjutan sosial (*equity*), keberlanjutan ekologi (*sustain*). Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus diperhatikan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumberdaya alam dan lingkungan merupakan basis untuk kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial yang tidak stabil akan cenderung menimbulkan tindakan yang merusak kelestarian sumberdaya alam dan merusak kesehatan lingkungan, sementara ancaman kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (misalnya kelangkaan tanah dan air) dapat mendorong terjadinya kekacauan dan penyakit sosial (Suryana 2005).

Secara spesifik Cincin-Sain dan Knecht (1998), menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga aspek utama, yaitu: (1)

pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, yaitu pembangunan yang menekankan manusia sebagai pusat perhatian; (2) pembangunan yang memperhatikan lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya, perlindungan proses ekologi, sistem pendukung kehidupan maupun keanekaragaman hayati; (3) pembangunan sosial secara adil dalam distribusi keuntungan pembangunan yang meliputi keadilan antar masyarakat, antar generasi, antar negara.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan hidup dan kehutanan, menjadi sangat penting, dengan mengedapankan pada tiga pilar utama tersebut secara bersama-sama. Agar keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan dapat terjaga dengan baik, khususnya di wilayah Propinsi Banten, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis SKPD/OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD/OPD adalah dokumen perencanaan SKPD/OPD untuk periode 5 (lima) tahun daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD/OPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD/OPD dan merupakan dokumen perencanaan daerah berorientasi 5 (lima) tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD/OPD dan acuan dalam penilaian kinerja SKPD/OPD oleh lembaga auditor baik

internal ataupun eksternal. Renstra SKPD/OPD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 tahun tersebut, SKPD/OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen perencanaan tersebut. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD/OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD/OPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD/OPD

Renstra SKPD/OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Propinsi Banten khususnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD Propinsi Banten 2017-2022 yang memuat visi, misi pemerintah melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Propinsi Banten untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2017-2022.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang diterjemahkan kedalam program-program pembangunan, kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Penyusunan Renstra juga didasarkan atas pertimbangan yuridis yang memayungi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus telah didukung oleh adanya peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk perundang-undangan, yakni; Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana kedua undang-undang tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renstra DLHK Provinsi Banten tahun 2017-2022, dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif dan *bottom-up/top-down* serta kerangka pendanaan. Proses penyusunannya meliputi 4 tahapan sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra; merupakan tahap awal dalam penyusunan Renstra, yang terdiri atas;
  - Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD/OPD;
  - Orientasi mengenai Renstra SKPD/OPD;
  - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD/OPD; dan
  - Penyiapan data dan informasi (RPJMD, RTRW, Dokumen KLHS, Renstra K/L, data gambaran pelayanan SKPD/OPD, dan dokumen terkait lainnya);
2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra; merupakan tahapan penyusunan rancangan awal Renstra, yang terdiri atas;
  - Perumusan rancangan Renstra SKPD/OPD;
  - Penyajian rancangan Renstra SKPD/OPD; menyampaikan hasil rancangan Renstra yang telah disusun dalam bentuk dokumen dengan berpedoman pada Permendagri No.54 tahun 2010 tentang

- tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta pelaksanaan forum Renstra SKPD/OPD dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD/OPD dan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD/OPD yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD/OPD;
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; merupakan tahapan penyusunan rancangan final/akhir dari Renstra yang disusun, terdiri atas;
    - Penyusunan rancangan akhir Renstra; merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD/OPD, yang berpedoman pada RPJMD;
    - Penyempurnaan rancangan Renstra; bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas & fungsi SKPD/OPD yang ditetapkan dalam RPJMD;
  4. Tahap Penetapan Renstra; merupakan tahapan akhir dari penyusunan Renstra, yang terdiri atas;
    - Rancangan akhir Renstra SKPD/OPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah;
    - Rancangan akhir Renstra SKPD/OPD selanjutnya diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk menjamin/memastikan kesesuaian Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD/OPD lainnya

- Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD/OPD menjadi Renstra SKPD/OPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;  
Penyusunan Renstra SKPD/OPD haruslah mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang memuat; a) visi, misi, dan program kepala daerah; b) arah kebijakan keuangan daerah; c) strategi pembangunan daerah; d) kebijakan umum; e) program SKPD; f) program lintas SKPD; g) program kewilayahan; h) rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan i) rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Serta terkait pula dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterkaitan Renstra SKPD/OPD dengan RPJMD merupakan keterkaitan tugas dan fungsi SKPD/OPD sebagai organisasi/lembaga pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam meuwujudkan visi dan misinya. Kewenangan tugas dan fungsi SKPD/OPD tersebut dituangkan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Keterkaitan tersebut juga merupakan keterkaitan struktural ditingkat daerah. Sedangkan keterkaitan Renstra SKPD/OPD dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah keterkaitan sektoral yakni kajian lingkungan hidup dan kehutanan serta keterkaitan struktural antara pemerintah pusat dengan daerah/propinsi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2017-2022, meliputi; Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, yakni;

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Banten Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Banten ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Banten Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Banten (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Propinsi Banten 2017-2022;
29. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten;
30. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan;
31. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dapat dijadikan sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi Banten 2017-2022 adalah:

- a. Memberikan arahan dan pedoman kepada aparatur internal DLHK dan *stakeholders* terkait, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten.
- b. Membangun sistem kerja DLKH Propinsi Banten yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c. Memberikan dorongan moral bagi aparatur DLHK Propinsi Banten dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja dinas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Substansi utama dalam Renstra SKPD adalah memuat visi dan misi SKPD/OPD, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sistematika penyusunan Renstra DLHK Propinsi banten tahun 2017-2022, disajikan sebagai berikut:

### **BAB I.Pendahuluan**

Bab ini berisikan uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

- Latar Belakang; memuat penjelasan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi.
- Landasan Hukum; memuat dasar hukum yang menjadi acuan/referensi, meliputi; undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

SKPD/OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD/OPD.

- Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD/OPD
- Sistematika Penulisan; memuat penjelasan ringkas tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD/OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD/OPD**

Bab ini berisikanuraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD/OPD, Sumber Daya SKPD/OPD, Kinerja Pelayanan SKPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;

- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD/OPD; memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD/OPD, struktur organisasi SKPD/OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD/OPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD/OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD/OPD (proses, prosedur, dan mekanisme).
- Sumber Daya SKPD/OPD; memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD/OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- Kinerja Pelayanan SKPD/OPD; memuat tingkat capaian kinerja SKPD/OPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD/OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan SKPD/OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD/OPD; mengemukakan tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dari kondisi pelayanan SKPD/OPD sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi eksternal dari rencana strategi yang disusun.

### **BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan tentang identifikasi isu-isu strategis. Telaah tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Banten. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD/OPD; mengemukakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam pelayanan SKPD/OPD berdasarkan tugas dan fungsinya, serta analisis kebutuhan dan isu-isu strategisnya.
- Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; mengemukakan tugas dan fungsi SKPD/OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota; mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD/OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD/OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra SKPD/OPD kabupaten/kota.

- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD/OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD/OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- Penentuan Isu-isu Strategis; menguraikan kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD/OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD/OPD ditinjau dari: Gambaran pelayanan SKPD/OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian; sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD/OPD kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD/OPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD/OPD serta dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD /OPD tahun rencana.

#### **BAB IV. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.

- Visi dan Misi SKPD/OPD; dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD/OPD;
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD/OPD; dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD/OPD;

## **BAB V. Strategi dan Kebijakan**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.

- Strategi dan Kebijakan SKPD/OPD; dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD/OPD dalam lima tahun mendatang;

## **BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

## **BAB VII. Indikator Kinerja SKPD/OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD/OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD/OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

## **BAB VIII. Penutup**

Bab ini memberikan catatan Penutup sebagai bagian akhir dari dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2017-2022.

## **BAB II**

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tersebut, selanjutnya menguraikan secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organasasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.

#### 1. *Kedudukan*

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. *Tugas Pokok*

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

#### 3. *Fungsi*

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;

- a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. Pengelolaan Kehati provinsi;
- d. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
  - 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

- 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
- k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
- l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
  - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
  - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - 3) Pemungutan hasil hutan;
  - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
- p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi  $< 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ;
- s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
- t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
- u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
- v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

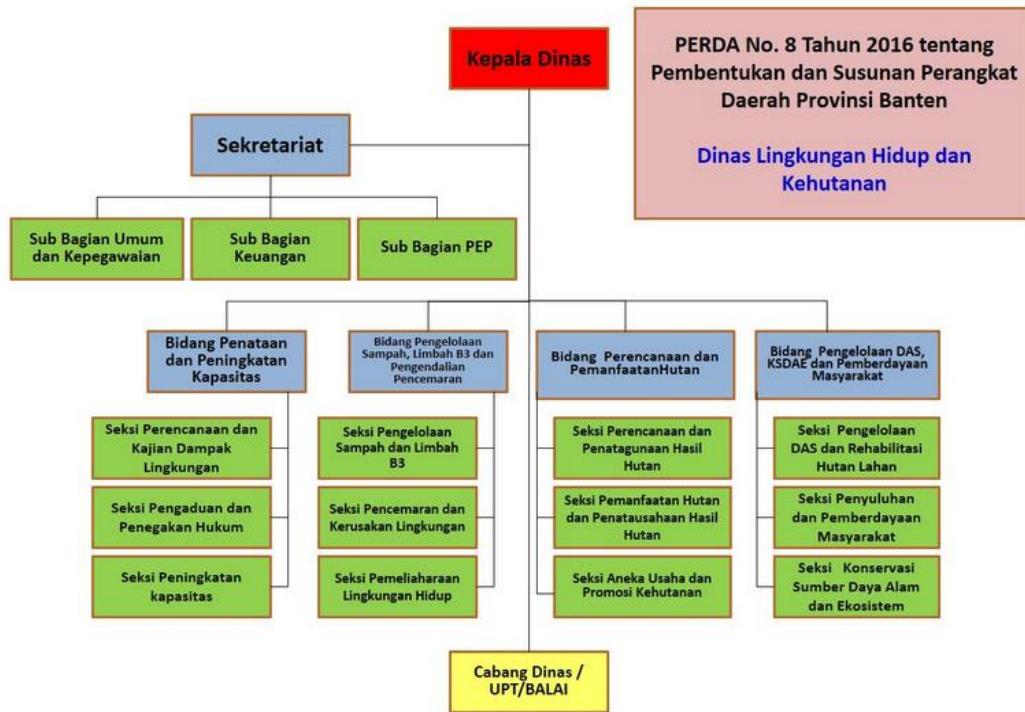
- w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
  - 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPT Laboratorium Lingkungan dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan peredaran hasil hutan dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan
- c. Pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas hasil hutan
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan
- g. Pengelolaan ketatausahaan Balai

#### 4. *Struktur Organisasi SKPD/OPD*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016, Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Pengelola Balai serta Penyuluhan (Jabatan Fungsional). Gambaran Struktur Organisasi sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Organisasi**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten**

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
  - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
  - Seksi Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi;
  - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- 5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
  - Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
  - Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
  - Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
- 6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;
  - Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
  - Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Jabatan Fungsional

## **Uraian Tugas dan Fungsi**

### **A. Kepala Dinas**

- Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Propinsi Banten
- Mengkoordinir dan merumuskan pengkajian dampak dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Mengkoordinir pengendalian pencemaran lingkungan.
- Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan.
- Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan.
- Menetapkan perizinan dibidang lingkungan hidup, yakni; izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala propinsi.

- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan organisasi pemerintah propinsi.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan program.
- Melaksanakan koordinasi, integasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Tugas Sekretariat**

- Menyusun rencana operasional sekretariat.
- Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Menyusun rencana kerja kesekretariatan Dinas.
- Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan evaluasi dan pelaporan.
- Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

- Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program.
- Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan.
- Menyiapkan bahan administrasi kepeawaian Dinas.
- Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Menyusun rencana operasional sub bagian umum dan kepegawaian.
- Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Menyusun rencana kerja sub bagian.
- Melaksanakan administrasi ketatausahaan Dinas.
- Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas.
- Melaksanakan kegiatan karsipan dan pengelolaan kepustakaan.
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas.
- Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas.
- Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya.
- Melaksanakan fungsi kehumasan.

- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.
- Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

**Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan**

- Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi dan pelaporan.
- Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Menyusun rencana operasional sub bagian sub bagian program, evaluasi dan pelaporan.
- Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Mementau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier.
- Mengkoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas.
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Dinas.

- Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Dinas yang bersumber dari APBD maupun APBN.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas.
- Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk propinsi dan kabupaten/kota.
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas.
- Melaporakan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

### **C. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas**

- Merencanakan kegiatan operasional Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas.
- Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Merencanakan bahan rumusan kebijaksanaan teknis dan operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas.
- Merencanakan bahan rencana program bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas.
- Menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis dan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah propinsi.

- Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan atau degradasi hutan.
- Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup dan kehutanan.
- Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup dan kehutanan.
- Menyusun bahan dan memfasilitasi kebutuhan Diklat (pendidikan dan pelatihan) dan penyuluhan.
- Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan.
- Merencanakan pelaksanaan pemanatauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang penataan dan peningkatan kapasitas.
- Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### *Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup*

- Membantu kepala bidang penataan dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- Menyusun rencana operasional seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.

- Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan.
- Merumuskan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- Pengkajian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung daya tampung.
- Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup).
- Melaksanakan kajian sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/kepulauan dan Ekoregion.
- Melaksanakan kajian Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDALH).
- Melaksanakan penyusunsn Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
- Melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
- Melaksanakan penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi.
- Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.
- Memfasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan KLHS Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pemantauan dan evaluasi KLHS Propinsi dan Kabupaten/Kota

- Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup).
- Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan AMDAL dan pemereiksaan UKL UPL.
- Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai Amdal, tim pakar dan tim teknis).
- Melaksanakan proses rekomendasi penerbitan izin lingkungan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL dalam wilayah Propinsi.
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum**

- Membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengaduan dan penegakan hukum.
- Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Melaksanakan kajian teknis penanganan penaduan, pestaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi Sanksi Administratif, Sengketa/Perdata dan Pidana.
- Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan, pestaatan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

- Melaksanakan program penanganan pengaduan, pestaatan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pestaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan, pestaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah dan kegiatan /usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran dan atau kerusakan.
- Membina petugas pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah.
- Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **Seksi Peningkatan Kapasitas**

- Menyusun rencana operasional seksi peningkatan kapasitas;
- Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum dat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

- Penyiapan Sarana dan Prasarana (sarpras) peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pengembangan materi pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pengembangan jenis penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pengembangan jenis penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Penyusunan kebijakan tatacara pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.
- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## **D. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran**

### **Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

- Menyusun rencana operasional seksi pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah di Propinsi;
- Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, penilaian, penggunaan ulang pendauran ulang, pengolahan, dan pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyediaan sarpras pengolahan sampah;
- Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangkutan limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alata angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/Propinsi, kota dalam wilayah;

- Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengembangan teknologi pengolahan limbah B3;
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengembangan investasi dalam usaha pengolahan limbah B3;
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

- Menyusun rencana operasional seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- Penentuan baku mutu lingkungan;
- Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penentuan kriteria kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

- Menyusun rencana operasional seksi pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- Menyelia dan memberikan petuntuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.
- Pelaksanaan perlindungan sumberdaya alam;
- Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
- Pelaksanaan pencadangan sumberdaya alam pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi;
- Pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- Pemanfaatauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- Penyelesaian konflik dalam pemanfaaan keanekaragaman hayati; dan
- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekragaman hayati;
- Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## **E. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan**

### *Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan*

- Perencanaan kehutanan
- Pemantapan kawasan hutan

### *Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan*

- Terwujudnya Kelompok Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat berbasis industri,
- Tertibnya penatausahaan hasil hutan

### *Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan*

- Pengembangan aneka usaha kehutanan
- Pengembangan kawasan bambu terpadu
- Promosi aneka usaha kehutanan

## **F. Bidang Pengelolaan DAS, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat**

### *Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan*

- perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan
- meningkatkan luas lahan yang terrehabilitasi
- Meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS

- Meningkatkan luas ruang terbuka hijau (RTH)
- Pembentukan dan pembinaan forum DAS

#### **Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

- Terbinanya masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi
- Terbentuknya lembaga konservasi
- Terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar
- Terpulihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi
- Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem esensial
- Terlaksananya Perencanaan Taman KEHATI Propinsi Banten
- Terlaksananya perencanaan pembentukan lembaga konservasi

#### **Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- Meningkatnya kapasitas SDM penyuluhan kehutanan
- Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan
- Terbentuknya dan berkembangnya kelembagaan kelompok tani hutan
- Terbentuknya kader konserasi dan kelompok pecinta alam
- Tersedianya data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan

### **G. UPT Laboratorium Lingkungan**

#### **Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan**

##### **1. Seksi Mutu**

- Jumlah Parameter Terakreditasi sebanyak 40 parameter Sampai dengan 2022
- Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan

## 2. Seksi Teknis

- Jumlah Pengujian dan Analisa Sample Uji;
- Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan

## 3. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan TAHURA
- Kepala Seksi Perlindungan & Rehabilitasi Balai Pengelolaan TAHURA
- Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pengelolaan TAHURA

## H. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

### Sub Bagian Tata Usaha Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

#### 1. Kepala Seksi Sertifikasi Benih Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

- Jumlah ketersediaan bibit tanaman kehutanan
- Jumlah penelusuran Sumber Benih unggul
- Peningkatan kapasitas tenaga teknis perbenihan Tanaman Kehutanan
- Jumlah Identifikasi jenis tanaman endemik Banten
- Pembangunan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan unggul
- Sertifikasi bibit tanaman hutan

#### 2. Seksi Teknis Proteksi Tanaman dan Pengawasan Peredaran Benih Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan

## I. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

### Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
- Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu
- Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

**Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon**

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
- Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu
- Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

**J. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang**

**Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak**

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
- Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu
- Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

**Seksi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang**

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu

- Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

## 2.2. Sumber Daya SKPD/OPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, seperti halnya SKPD/OPD lainnya, dilengkapi dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya lainnya. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kinerja organisasi agar menjadi lebih baik dan optimal.

### A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten sebanyak 176 orang dengan rincian jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	30	Penyuluhan
5	Fungsional Umum	105	Pelaksana/ ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>176</b>	

*Sumber: DLHK Banten, 2017*

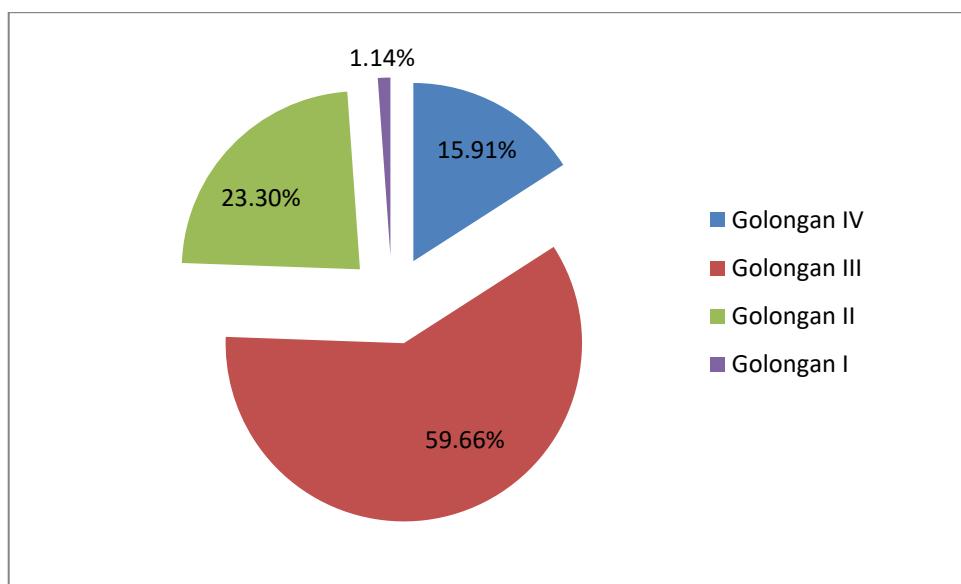
Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	4	-	-	-	4
4	Kepala Balai / UPT	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	1	7	-	-	8
7	Kepala Seksi	5	15	-	-	20
8	Penyuluh	10	20	-	-	30
9	Pelaksana/ ASN	2	62	41	2	107
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>104</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>176</b>

Sumber: DLHK Banten, 2017

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 28 orang (15,91%), Golongan III sebanyak 105 orang (59,66%), Golongan II sebanyak 41 orang (23,30%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,14%). Secara grafis disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2.** Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni; barang bergerak dan barang tidak bergerak. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.

**Tabel 3.**Sarana dan Prasarana  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

No	Sarana Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	42	33	9
2	Roda Dua	59	45	14
3	Roda Tiga	5	5	-
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	3	3	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	Gedung Kantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	791	457	334
6	Kursi Kantor	1173	645	528
7	Komputer	64	54	10
8	Mesin Ketik	8	8	-
9	Peralatan Laboratorium	322	167	155
10	Peralatan Gambar	2	2	-
11	Barang lainnya	3395	1755	1640

Sumber: DLHK Banten, 2017

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya diestimasi mencapai 50,7 milyar dengan rincian sebagai berikut:

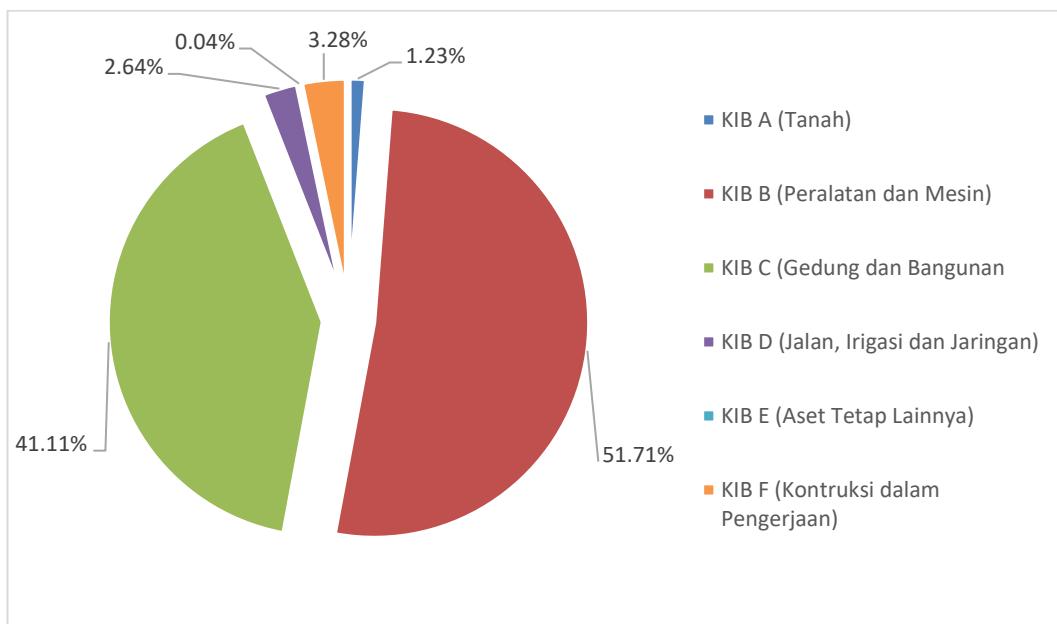
**Tabel 4.** Jenis Aset dan Nilai Barang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

No	Barang/Aset	Nilai Barang	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	1.077.200.000	
2	Perlengkapan dan Mesin (KIB-B)	45.449.888.310	Kendaraan, Meja, Kursi, AC, PC, Printer, Laptop
3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	36.133.649.840	Gedung Kantor, Kantin, Kanopi Parkir, Toilet, Tempat Wudhu, Kanopi Musholah
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	2.316.835.450	IPAL, Instalasi LAN

No	Barang/Aset	Nilai Barang	Keterangan
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	34.595.600	Maket Gunung Krakatau dan Badak Bercula
6	Konstruksi dalam pengerjaan (KIB-F)	2.880.773.000	Alat Pemantau Kualitas Udara
	<b>Total</b>	<b>87.892.942.200</b>	

Sumber: DLHK Banten, 2017

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten hingga tahun 2017 adalah sebanyak 50,7 miliar dengan persentase tertinggi adalah jenis perlengkapan dan mesin yakni 27,9 miliar (55,05%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 14,8 juta (0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut:



**Gambar 3.** Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten

### C. Sumberdaya Lainnya

Sumber Daya lainnya atau dikategorikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten adalah sumber daya yang dimiliki atas hak pengelolaan sumber

daya alam, meliputi; hutan/kawasan hutan, ekosistem hutan dan sumber daya hasil hutan.

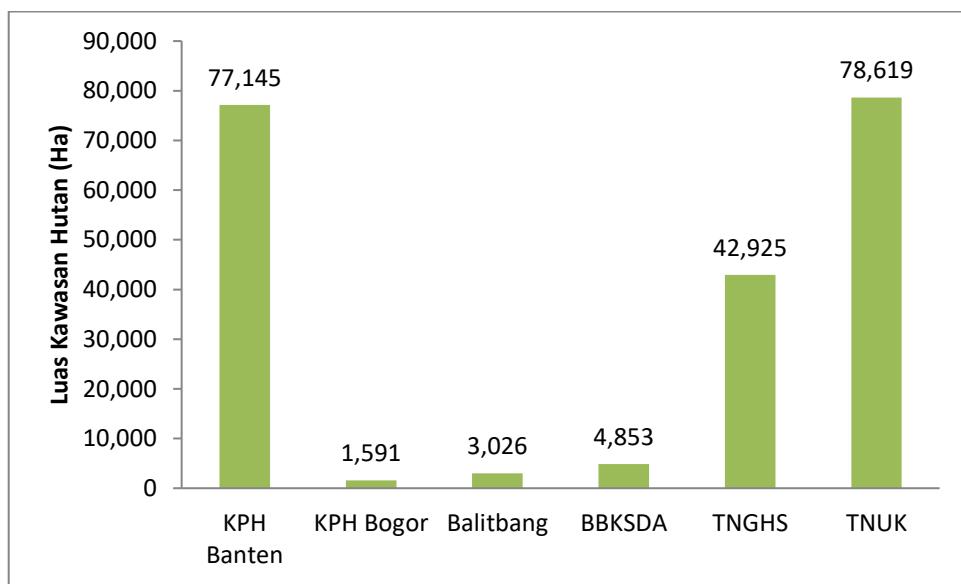
Propinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Propinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

**Tabel 5.** Luas Kawasan Hutan di Propinsi Banten

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
1	KPH Banten	69.266	7.879	-	77.145
2	KPH Bogor	-	1.591	-	1.591
3	Balitbang	3.026	-	-	3.026
4	BBKSDA	-	-	4.853	4.853
5	TNGHS	-	-	42.925	42.925
6	TNUK	-	-	78.619	78.619
<b>Total</b>		<b>72.292</b>	<b>9.471</b>	<b>126.397</b>	<b>208.161</b>

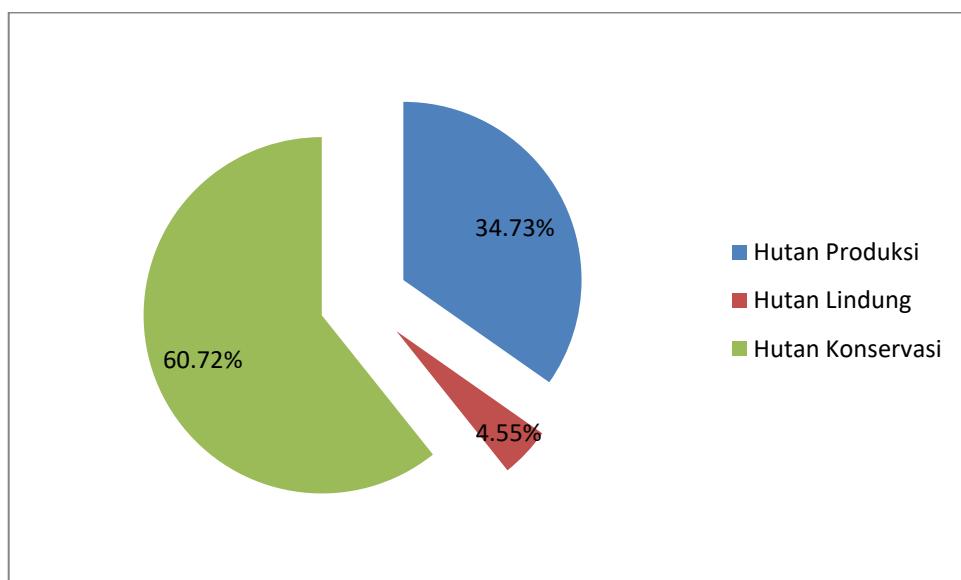
*Sumber: DLHK Banten, 2017*

Berdasarkan jenis/tipe pengelolaan kawasan hutan di Propinsi Banten yang termasuk dalam kewenangan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten adalah seluas 208.161 Ha, meliputi; KPH Banten 77.145 Ha, KPH Bogor 1.591 Ha, Balitbang 3.026 Ha, BBKSDA 4.853 Ha, TNGHS 42.925 Ha dan TNUK 78.619 Ha. Grafik luasan kawasan hutan berdasarkan pengelolaannya disajikan sebagai berikut:



**Gambar 4.** Gambaran Luas Kawasan Hutan di Propinsi Banten

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Propinsi Banten meliputi; Hutan Produksi (HP) seluas 72.292 Ha, Hutan Lindung 9.471 Ha dan Hutan Konservasi 126.397 Ha. Persentase luasan dari masing-masing tipe fungsi tersebut disajikan sebagai berikut:



**Gambar 5.** Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

Kawasan konservasi yang terdapat di Propinsi Banten terdiri dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman

Nasional Gunung Halimun Salak. Luas Taman Nasional Ujung Kulon (daratan) adalah seluas 78.619 Ha, dan kawasan taman/perairan lautnya seluas 44.337 Ha. Sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua Propinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Propinsi Banten seluas 42.925,15 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam seluas 4.230 ha dan Taman Wisata Alam seluas 623,15 Ha serta Taman Wisata Alam Perairan Laut seluas 720,00 Ha.

**Tabel 6.** Rencana Kawasan Lindung Propinsi Banten Tahun 2010-2030

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Hutan Lindung	9.804,47	1,01	Kep.Direksi Perhutani No.681/KPTS/DIR/2013
2	Sempadan Pantai	5.174,00	0,54	
3	Sempadan Sungai	7.877,00	0,82	
4	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	83.155,00	8,61	
5	Kawasan Sekitar Mata Air	787,00	0,08	
6	Kawasan Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	0,37	SK.3586/Menhut-VII/KUH/2014
7	Kawasan Cagar Alam Tukung Gede	1.519,50	0,16	SK.3622/Menhut-VII/KUH/2014
8	Kawasan Cagar Alam Pulau Dua	32,85	0,003	SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014
9	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	61.357,46	6,35	SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014
10	Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	42.925,15	4,44	Kepmenhut No.698/Kpts-II/2003
11	Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1.595,90	0,17	SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014
12	Kawasan Taman Wsita Alam Pulau Sangjang	528,15	0,05	Kepmenhut No.698/Kpts-II/1991
13	Kawasan Rawan Bencana	66.451,33	6,88	
14	Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy	5.137,00	0,53	
<b>Total</b>		<b>289.887,60</b>	<b>30,00</b>	

*Sumber: DLHK Banten, 2017*

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat satwa spesific endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sundanicus*). Selain hal tersebut di atas Propinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoar air di wilayah Propinsi Banten Bagian Barat.

Kawasan hutan produksi di Propinsi Banten terbagi kedalam beberapa kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan Jati 34.759,15 Ha, kelas perusahaan Mahoni 14.844,44 Ha, dan kelas perusahaan Acacia mangium 22.179,19 Ha. Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Propinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Propinsi Banten terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai penting antara lain DAS Ciujung seluas 279.839 Ha, DAS Cidanau seluas 22.620 Ha dan DAS Cibaliung seluas 63.669 Ha yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi cathment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan sering terjadinya banjir di wilayah DAS Ciujung, selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian sedangkan

DAS Cidana merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng.

Pengelolaan kawasan hutan produksi di Propinsi Banten diarahkan bagi pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Lokasi kawasan hutan produksi tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, meliputi kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Kencana, Bojong Manik, Cikulur dan Cimarga); Kabupaten Pandeglang, meliputi Cikeusik, Munjul, Cibaliung, Mandalawangi, Labuan dan Cimanggu; serta Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Mancak dan Ciomas.

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di Propinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m<sup>3</sup> dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Propinsi Banten terbesar luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di Propinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni, dll

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Banten, luas wilayah Propinsi Banten seluas 865.120 ha, sedangkan luas kawasan hutan negara baru mencapai 208.161,27 ha. Bila mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi luas hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) tetapi secara faktual proporsi luas hutan di Propinsi Banten baru mencapai 24,06 %. Walapun demikian dengan terdapatnya hutan rakyat diluar kawasan hutan, luas total tutupan lahan di Propinsi Banten masih lebih luas dari kawasan hutan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD/OPD**

Kinerja pelayanan SKPD/OPD sangat terkait dengan tugas dan fungsi SKPD/OPD tersebut. Demikian halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten. Tugas dan fungsinya telah dijabarkan secara detil dan terstruktur sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan tugas pokok adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Penugasan tersebut tidak terlepas dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya disebutkan urusan yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah antara lain; a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; dan c) Pengendalian lingkungan hidup. Ketiga urusan tersebut sangat terkait erat dengan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Disamping kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, juga melaksanakan kewenangan lainnya sebagai pelaksanaan atas dekosentrasi maupun azas tugas pembantuan. Dengan kewenangan tersebut penanganan lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan di Propinsi Banten ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan suatu ekosistem yang serasi, selaras dan berkesinambungan serta memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan yang bernilai ekonomis.

Penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu terus menerus dilakukan penyempurnaan kearah yang lebih baik, yang disusun dalam suatu tahapan perencanaan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil/*output*.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan telah menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Banten khususnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang kian memprihatinkan. Data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang dirilis tahun 2015, menunjukkan bahwa Propinsi Banten dari aspek kualitas udara memiliki indeks terendah yakni 50,65, aspek kualitas air memiliki indeks 51,75 dan indeks tutupan lahan hanya 17,00%. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Propinsi Banten dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan khususnya untuk segera melakukan berbagai upaya-upaya terobosan untuk segera melakukan perbaikan indeks kualitas lingkungan dan kehutannya.

Agar perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih terstruktur dan objektif, maka evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan dan Kehutanan, perlu menjadi dasar dalam penyusunan rencana-rencana program dan kegiatan terkait peningkatan indeks kualitas lingkungan dan kehutanan di Propinsi Banten. Berikut adalah capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2015.

**Tabel 7.** Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM	20%	100%	500%
	Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan	20%	75%	375%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
	pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup			
Meningkatnya fungsi kawasan lindung	Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung	20%	20%	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	100%
	Rasio ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%	100%	100%
Meningkatnya pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100%
	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100%
	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	90%	90%
	Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan	100%	100%	100%

*Sumber: DLHK Banten, 2017*

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, secara umum mencapai pencapaian 100%, bahkan untuk rencana strategis berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana mencapai pencapaian kinerja 500%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten, sangat konsen dan serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

#### A. Indikator Kinerja Kunci

Capaian Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten pada tahun 2016 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi; Pencemaran Udara, Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL, dan Penegakan Hukum Lingkungan.

**Tabel 8. Indikator Kinerja Kunci dan Capaiannya**  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian	Keterangan
1	Pencemaran Udara	100%	Rata-rata tingkat pencemaran udara pada tiap kabupaten/kota yang telah dipantau menunjukkan kriteria "baik". Pemantauan dilakukan di 3 titik, yaitu kawasan padat lalu lintas, pemukiman dan kawasan industri
2	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL	78,12%	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasai adalah 50 kegiatan/usaha dari total 64 kegiatan/usaha
3	Penegakan Hukum Lingkungan	100%	Capaian Kinerja Kab/Kota adalah; (1) Kota Serang : 100% (2) Kota Cilegon : 100% (3) Kota Tangerang : 100% (4) Kota Tangerang Selatan : 100% (5) Kab. Serang : 100% (6) Kab. Tangerang : 100%, (7) Kab. Pandeglang : 100%, (8) Kab. Lebak : 100%

*Sumber: DLHK Banten, 2017*

## **B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan (Pencapaian SPM)**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggarannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara

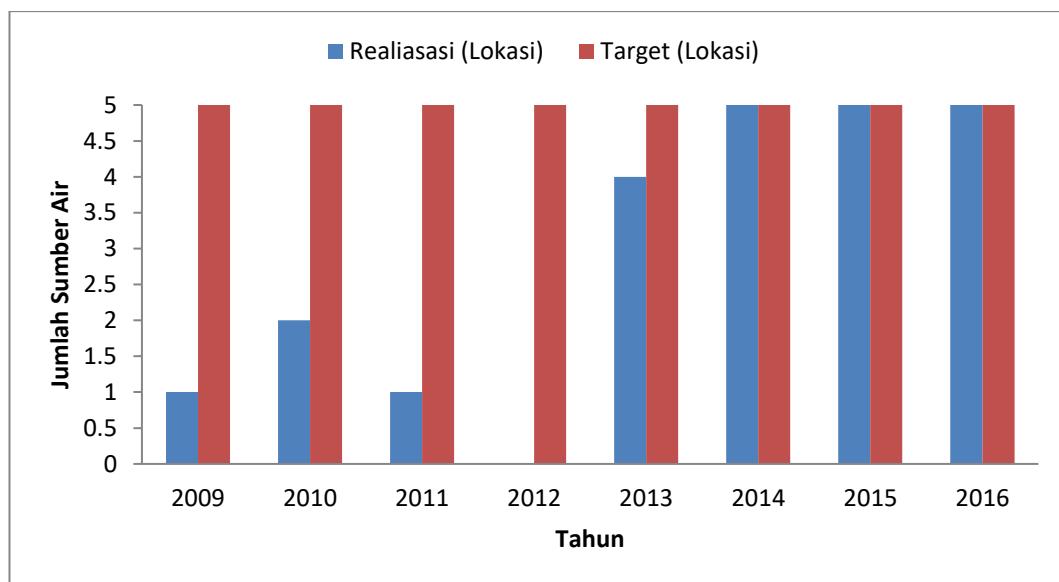
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009 - 2016, bidang lingkungan hidup (Pelayanan Informasi Status Mutu Air) di Propinsi Banten, adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.** Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Tahun	Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya Ditetapkan Status Mutu Air & Diinformasikan	Jumlah Sumber Air Yang Ditetapkan dari Hasil Identifikasi	Persentase Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya & Ditetapkan Status Mutu Air & Diinformasikan
2009	1	5	20%
2010	2	5	40%
2011	1	5	20%
2012	0	5	0%
2013	4	5	80%
2014	5	5	100%
2015	5	5	100%
2016	5	5	100%

*Sumber: DLHK Banten, 2017*



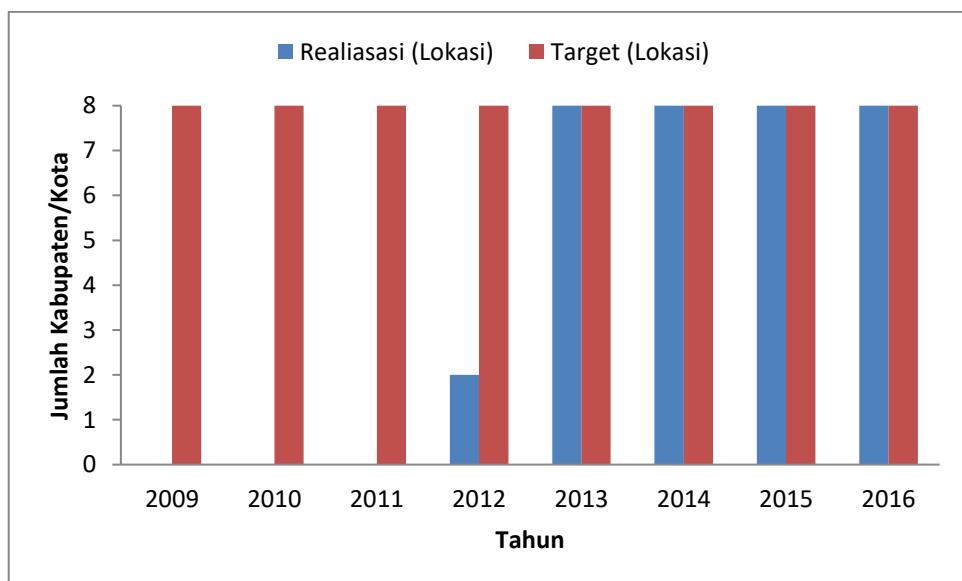
**Gambar 6.** Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Air tahun 2009-2016 di Provinsi Banten

Hasil capaian SPM untuk pelayanan informasi status mutu air dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan keberhasilan yang baik, dimana sejak tahun 2014-2016 pelayanan minimum untuk informasi status mutu air telah terpenuhi dengan baik, yakni mencapai realisasi 100%.

**Tabel 10.** Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Udara

Tahun	Jumlah Kab/Kota Yang Dipantau Kualitas Udara Ambien & Diinformasikan Status Mutunya	Jumlah Kab/Kota Yang Ada di Wil Banten	Persentase Jumlah Kab/Kota Dipantau Kualitas Udara Ambien & Diinformasikan Status Mutunya
2009	0	8	0%
2010	0	8	0%
2011	0	8	0%
2012	2	8	25%
2013	8	8	100%
2014	8	8	100%
2015	8	8	100%
2016	8	8	100%

*Sumber: DLHK Banten, 2017*



**Gambar 7.** Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien tahun 2009-2016 di Provinsi Banten

Hasil capaian SPM untuk pelayanan informasi status mutu udara ambien dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan keberhasilan yang baik, dimana sejak tahun 2013-2016 pelayanan minimun untuk informasi status mutu udara ambien telah terpenuhi dengan baik, yakni mencapai realisasi 100%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD/OPD**

Tantangan/ Ancaman (*Threat*) dan peluang (*Opportunities*) merupakan analisis lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi dalam implementasi rencana strategis (program dan kegiatan). Peluang (*Opportunities*) adalah faktor-faktor positif dan bersifat eksternal yang mampu mengarahkan kelembagaan/organisasi kearahnya yang lebih baik. Sedang Ancaman (*Threats*) adalah faktor-faktor negatif dan bersifat eksternal yang dapat menghambat tercapainya tujuan kelembagaan/organisasi.

Tahapan awal yang dilakukan agar rencana strategi yang disusun dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan khususnya pada lingkungan eksternal, maka perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang, sebagai berikut:

##### **1. Tantangan(*Threat*)**

- a) Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah (Kab/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksplorasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya;

- b) Pertumbuhan ekonomi daerah, nasional dan internasional yang terus tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c) Perubahan iklim global (*global warming*), akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka air laut (banjir rob);
- d) Isu ekonomi hijau (*green economics* ) dan ekonomi biru (*blue economics*) menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat menekan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;
- e) Produktivitas hutan dari aspek non-kayu masih sangat rendah dan belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan;
- f) Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- g) Masih banyaknya peraturan dan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang tumpang tindih, sehingga masih sangat sulit dalam implementasinya;
- h) Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
- i) Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- j) Konsep *environmental warranty* pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagai dampak dari eksternalitas usaha belum diterapkan;

## 2. Peluang(*Opportunities*)

- a) Adanya program perhutanan sosial yang telah dicanangkan Presiden dan telah dimulai untuk skala pilot project sebanyak 16 lokasi, skala kolaborasi dengan Dementerian Desa sebanyak 50 lokasi, dan skala kolaborasi dengan NGO dan kelompok masyarakat sebanyak 34 lokasi;
- b) Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dengan akses pemasaran yang relatif dekat;
- c) Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk pemanfaatan hasil hutan, seperti; jamur, madu, gula areng dan lainnya;
- d) Mulai berkembangnya Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); seperti; pengembangan budi daya Jamur Kayu, lebah madu (Afis Cerana, Trigona/Lanceng);
- e) Potensi kebutuhan pupuk organik yang sangat tinggi untuk menunjang pertanian organik;
- f) Potensi mitra usaha/investor pada sektor kehutanan yang tergolong cukup tinggi, seperti; penanaman tanaman hutan;
- g) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman kehutanan tersedia;
- h) Perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli lingkungan;
- i) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- j) Penerapan otonomi daerah yang mulai baik dan kondusif, baik ditingkat propinsi ataupun ditingkat kabupaten/kota;

## **BAB III**

### 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD/OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya untuk mengetahui faktor internal dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun, sehingga kekuatan (*Strength*) yang ada dapat dioptimalkan dan kelemahannya (*Weaknesses*) diminimalisir. Faktor Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*) merupakan dua faktor internal yang harus diketahui dengan baik agar tujuan yang dicanangkan dapat terwujud dengan baik. Setiap lembaga/organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD/OPD dalam pelayananannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi SKPD/OPD.

Kekuatan (*Strengths*) merupakan segala hal/daya yang dibutuhkan dan dimiliki dan bersifat internal kelembagaan/organisasi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Sedang Kelemahan (*Weaknesses*) adalah segala hal yang berupa kekurangan/ketidakmampuan yang bersifat internal kelembagaan/organisasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan. Secara umum kekuatan dan kelemahan yang dihadapi

SKPD/OPD dalam memenuhi tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

### **1. Kekuatan (Strength)**

- a. Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Telah diterbitkannya berbagai peraturan teknis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009; UU Nomor 41 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi; kompetensi, profesionalisme;
- d. Komitmen pimpinan SKPD/OPD yang tinggi;
- e. Motivasi dan kepercayaan yang diberikan pimpinan;
- f. Komunikasi dan jejaring kerja yang baik antar unit;
- g. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu; kendaraan operasional, sarana prasarana/peralatan kantor dan peralatan laboratorium;
- h. Tersedianya dukungan anggaran, meliputi; Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD serta APBN;

### **2. Kelemahan (Weaknesses)**

- a. Masih terbatasnya data dan informasi tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, *social marketing* belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;
- c. Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup belum dibuat);

- d. Produksi, produktivitas dan mutu komoditas kehutanan belum sesuai standar;
- e. Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan belum optimal;
- f. Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai;
- g. Masih lemahnya Sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- h. Terbatasnya tim penyuluh kehutanan;

### ***3. Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi***

Telaah isi (*Content Analysis*) digunakan untuk melihat keterkaitan keselarasan antara tugas dan fungsi DLHK Propinsi Banten. Sedang analisis kebutuhan digunakan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan DLHK Propinsi Banten berdasarkan Tugas dan Fungsinya. Analisis kebutuhan merupakan analisis lanjutan atas telaah isi yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan SKPD/OPD dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Tabel 11 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Analisis Faktor Internal (SW)

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
Mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Propinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Propinsi;</li> <li>- Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah propinsi;</li> <li>- Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bidang Lingkungan Hidup;</li> <li>- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Propinsi Banten</li> <li>- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Banten</li> <li>- Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Propinsi Banten</li> <li>- Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>- Pengelolaan Limbah B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPPLH, KLHS, dan KRP</li> <li>- Penyusunan Rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>- Penyusunan rencana pengelolaan limbah B3</li> <li>- Inventarisasi izin PPLH</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> <li>- Inventarisasi dan penyelesaian</li> </ul>	<p><b><u>Kekuatan (Strength)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Telah diberlakukannya UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>- Telah diterbitkannya berbagai peraturan terknis dalam implementasi UU PPLH dan UU PS</li> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional</li> <li>- Komitmen dan</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah propinsi;</li> <li>- Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah propinsi;</li> <li>- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin PPLH</li> <li>- Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal</li> <li>- Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</li> <li>- Penghargaan lingkungan hidup</li> <li>- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH</li> <li>- Pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengaduan dan konflik terkait lingkungan hidup</li> <li>- Penyelenggaran Diklat dan penyuluhan</li> <li>- Inventarisasi dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Pengelolaan Sampah dan penetapan TPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengalaman Pimpinan SKPD/OPD dalam memimpin</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk</li> <li>- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, <i>social marketing</i> belum</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>oleh pemerintah daerah propinsi;</p> <p>2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan sampah di TPA/TPST regional;</li> </ul>			<p>seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup belum dibuat);</li> <li>- Terbatasnya tim penyuluh lingkungan hidup</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Kehati Propinsi;</li> <li>- Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);</li> <li>- Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);</li> <li>- Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan</li> </ul>	<p>Bidang Kehutanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)</li> <li>- Pengelolaan Hutan (KPHK)</li> <li>- Program rehabilitasi</li> <li>- TAHURA (Taman Hutan Raya)</li> <li>- Perlindungan tumbuhan (Appendix CITES)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi KEHATI</li> <li>- Peningkatan program rehabilitasi</li> <li>- Peningkatan program perlindungan tumbuhan</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>- Peningkatan</li> </ul>	<p><u><b>Kekuatan (Strength)</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</li> <li>- Telah diterbitkannya</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;</li> <li>- Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu; -</li> <li>- Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/tahun;</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat dan Penyuluhan Hutan</li> <li>- Pemberdayaan Masyarakat terkait Hutan</li> <li>- Pengelolaan DAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>program pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD/OPD</li> <li>- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup &amp; kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berbagai peraturan terknis dalam implementasi UU Kehutanan dan UU PPPH</li> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional dibidang Kehutanan (Sarjana &amp; Magister Kehutanan)</li> <li>- Komitmen dan pengalaman Pimpinan SKPD/OPD dalam memimpin</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- Kelengkapan sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyanga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;</li> <li>- Pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi;</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi;</li> <li>- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya</li> </ul>			<p>kendaraan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul> <p><b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk</li> <li>- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;</li> <li>- Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro Kehutanan belum dibuat)</li> <li>- Terbatasnya tim penyuluhan kehutanan</li> <li>- Produksi,</li> </ul>

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
				<p>produktivitas dan mutu komoditas kehutanan belum sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan belum optimal;</li> <li>- Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- A. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup
  1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
  2. KLHS dan Kebijakan dan Rencana Program (KRP) Provinsi;
  3. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  4. Pegelolaan KEHATI PROVINSI;
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;
  7. Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
  8. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
  9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
  10. Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi;
  11. Penyelesaian pengaduan LH di bidang PPLH terhadap:
    - Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi

- Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota.
12. Penanganan sampah di TPA/TPST regional.
- B. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Kehutanan
1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
  2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
  3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
    - a. Pemanfaatan kawasan hutan;
    - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
    - c. Pemungutan hasil hutan;
    - d. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
  4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
  5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
  6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
  7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitasah.produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun.
  8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
  9. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.
  10. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*)
  11. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

12. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.
  13. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
  14. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan harapan masyarakat Provinsi Banten, maka Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 ***"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"***. Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, Misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk mendukung pencapaian Misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi lima tahapan sebagai berikut:

1. RPJMD Ke-1 (Renstrada Tahun 2005-2006 & Renstra Transisi 2007) / Tahap Revitalisasi - I
2. RPJMD Ke-2 (Tahun 2008-2012) / Tahap Revitalisasi - II
3. RPJMD Ke-3 (Tahun 2013-2017) / Tahap Akselerasi - I

4. RPJMD Ke-4 (Tahun 2018-2022) / Tahap Akselerasi – II
5. RPJMD Ke-5 (Tahun 2023-2025) / Tahap Modernisasi

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan arah utama dalam pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi tersebut akan sangat menentukan kemana arah pembangunan sutau daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Banten serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”**. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan-perubahan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Propinsi Banten dapat lebih berperan segala aspek di lingkup nasional, regional, maupun global.

Kerangka visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut untuk tahun 2017-2022 adalah ditekankan pada 5 (lima) aspek, yakni;

- 1) Maju; dimaknai sebagai Banten yang memiliki kemajuan dalam segala aspek pembangunan, seperti; Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan sebagainya;
- 2) Mandiri; dimaknai sebagai Banten yang mampu berdiri sendiri dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional, dengan kata lain tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau daerah lainnya menjadi sangat minim;
- 3) Berdaya Saing; dimaknai sebagai Banten yang memiliki daya saing yang tinggi dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat. Berdaya Saing tinggi yang ditunjang oleh pendidikan yang baik dan merata serta *skill* (kemampuan/keterampilan).
- 4) Sejahtera; dimaknai sebagai Banten yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif baik dengan persentase tingkat kemiskinan yang relatif kecil;

5) Berakhhlakul Karimah; dimaknai sebagai Banten yang memiliki masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Misi Kedua, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas
4. Misi Keempat, Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Misi Kelima, Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah pernyataan misi ke-5 "Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi". Dengan tujuan yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung Konektivitas Pengembangan Wilayah/Kawasan Guna Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten serta Meningkatkan Layanan Dasar Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Arah kebijakan yang diambil adalah Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta pengendalian pencemaran dan kerusakan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Tabel 12 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi Kepala Daerah Terpilih dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).</li> <li>2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.</li> <li>3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas</li> <li>4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)</li> <li>- Kualitas Infrastruktur</li> <li>- Pemerataan Pendidikan</li> <li>- Pemerataan Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD</li> <li>- Peningkatan Infrastruktur</li> <li>- Peningkatan akses pendidikan</li> <li>- Peningkatan akses kesehatan</li> <li>- Peningkatan pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<p><b><u>Kekuatan (Strength)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional</li> <li>- Komitmen dan pengalaman Pimpinan SKPD/OPD dalam memimpin</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- Tersedianya Sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana</li> </ul>

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
				<p>yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p><b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk</li> <li>- Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, <i>social marketing</i> belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;</li> <li>- Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan</li> </ul>

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
				<p>hidup dan kehutanan belum dibuat);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya tim penyuluh</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian LHK

Renstra KLHK mengacu pada Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yakni "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni: "Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif, serta Berperan dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan Menekankan pada Ekonomi Hijau". Visi tersebut didasarkan pada Nawa Cita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015. Untuk mewujudkan visi KLHK tersebut, maka misi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;

2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;
- 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah

hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Tabel 13 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi KLHK dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan SKPD/POD

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif, serta Berperan dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan Menekankan pada Ekonomi Hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;</li> <li>2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;</li> <li>3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas lingkungan</li> <li>- Daya dukung lingkungan</li> <li>- Pengendalian pencemaran</li> <li>- Pengelolaan DAS</li> <li>- Keanekaragaman hayati</li> <li>- Pengendalian perubahan iklim</li> <li>- Luasan dan fungsi hutan</li> <li>- Hutan kegiatan sosial</li> <li>- Ekonomi rakyat</li> <li>- Jenis dan jumlah flora dan fauna yang dilindungi</li> <li>- Keseimbangan ekosistem</li> <li>- Keberadaan sumberdaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana prasarana pengukuran &amp; pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>)</li> <li>- Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga surveyor dan laboran terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD terkait pengukuran &amp; pemantauan kualitas</li> </ul>	<p><b><u>Kekuatan (Strength)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional</li> <li>- Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf</li> <li>- Tersedianya Sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan)</li> <li>- Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan</li> </ul>

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
			-	<p><b><u>Kelemahan (Weakness)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya sarana pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (khususnya digital equipments)</li> <li>- Belum lengkapnya SOP pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan</li> <li>- Terbatasnya tim survei dan laboran</li> </ul>

### **3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan dan strategi penataan ruang ini meliputi; 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, dan 3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Lebih rinci sebagai berikut:

#### **3.4.1 *Kebijakan dan Strategi Pada Struktur Ruang***

- A. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
  - Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
  - mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
- B. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
  - Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
  - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- C. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten;
  - Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan

prasaranan wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;

### ***3.4.2 Kebijakan dan Strategi Pada Pola Ruang***

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten akan meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

- A. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
  - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - Mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
- B. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
  - Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- C. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- D. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang;

- Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
- Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;

E. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya

- Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;

F. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

- Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
- Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;

G. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;

- Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

#### Strategi Pengembangan Pola Ruang

Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri atas strategi pengembangan kawasan lindung dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Strategi pengembangan kawasan lindung terdiri dari: Strategi berupa peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya meliputi:

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
2. Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
3. Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
4. Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
5. Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi:

1. Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
4. Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

7. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang, meliputi:

1. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
2. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
3. Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.

#### Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Strategi peningkatan produktivitas kawasan budidaya, meliputi :

1. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
2. Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
3. Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:

1. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
4. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
5. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
2. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
3. Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;

4. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

#### Rencana Kawasan Lindung

Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan lindung geologi;
7. Kawasan lindung lainnya.

Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Rencana kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung
  - a) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan

menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan.

b) Kriteria Penetapan

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau;
- Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40% dan/atau;
- Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keaneka-ragaman hayati yang tinggi.

Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan seluas kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- b) Kriteria Penetapan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten

Pandeglang, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, Pegunungan Aseupan-Karang-Pulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

### 3. Kawasan Perlindungan Setempat

#### a) Sempadan Pantai

- Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- Kriteria Penetapan. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.

#### b) Sempadan Sungai

- Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- Kriteria Penetapan

- Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman.
- Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.
- Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, dan DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen.

c) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ untuk melindungi danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/situ.
- Kriteria Penetapan. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk antara 50 - 100 meter ke arah darat. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.

d) Kawasan Sekitar Mata Air

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kondisi fisik kawasan di sekitarnya.
- Kriteria Penetapan. Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.

e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah sebagai berikut.
- Kriteria Cagar Alam, adalah :
  - Kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya;
  - Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
  - mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
  - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;

- Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut:

1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
2. CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kota Serang.

▪ Kriteria Taman Nasional, adalah :

- Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;

Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri. Taman Nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang.
2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
3. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah sebagai berikut :
  - Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
  - Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
  - Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang.
2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Pandeglang
3. Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyanga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan

TAHURA di Provinsi Banten adalah Komplek Gunung Aseupan seluas kurang lebih 7.000 Ha. Adapun alokasi pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Adapun di dalam komplek Gunung Aseupan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan RI.

4. Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk ilmu pengetahuan. Kawasan konservasi cagar budaya perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
  - a. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
  - b. Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir. Adapun kawasan rawan bencana alam tersebut, meliputi :
    - Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung Krakatau.

- Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang (berada pada DAS Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada pada DAS Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS Ciliman, Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS Ciujung dan Cibinuangeun), Kabupaten Serang (berada pada DAS Ciujung).
- Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon).
- Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Mandalawasngi, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis), Kabupaten Lebak (Kecamatan Cigembong, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan).

#### Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri dari:

- a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- b) Kawasan Peruntukan Pertanian
- c) Kawasan Peruntukan Perkebunan
- d) Kawasan Peruntukan Perikanan
- e) Kawasan Peruntukan Pertambangan
- f) Kawasan Peruntukan Industri
- g) Kawasan Peruntukan Pariwisata
- h) Kawasan Peruntukan Permukiman

Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara -Merak - Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten, meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- a. Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
- b. Kriteria Penetapan
  - Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (score) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
  - Kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, hutan alam dan hutan tanaman dapat memberikan manfaat:
    - Mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi di sekitarnya;
    - Meningkatkan fungsi lindung;
    - Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan;
    - Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;

- Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
  - Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
  - Meningkatkan ekspor;
  - Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- c. Arah pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi:
- Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat.
  - Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam atau di tepi kota.
  - Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten.

## 2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

- a. Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dalam meningkatkan produksi tanaman lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Kriteria Penetapan
- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering.
  - Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat:

- Meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan pendayagunaan investasi yang adil;
- Meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan fungsi lindung;
- Upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- Meningkatkan kesempatan kerja;
- Meningkatkan ekspor;
- Meningkatkan perkembangan masyarakat.

c. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan :

- Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor.
- Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
- Peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan memalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing.
- Perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.Kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten.

### ***3.4.3 Kebijakan dan Strategi Pada Kawasan Strategis***

- A. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.
  - Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
  - Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- B. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar;
  - Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
  - Meningkatkan kepariwisataan;
- C. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
  - Menciptakan iklim investasi yang kondusif;

- Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;
- D. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;

Tabel 14 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan RTRW & KLHS dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan SKPD/POD

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
<p><b>Kebijakan dan Strategi Pada Struktur Ruang</b></p> <p><i>Kebijakan Struktur Ruang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;</li> <li>2. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;</li> <li>3. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten;</li> </ol> <p><i>Strategi Struktur Ruang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;</li> <li>2. Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);</li> <li>3. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perizinan permukiman dan jaringan</li> <li>- Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan khususnya permukiman dan jaringan</li> </ul>	<p><b>Kekuatan (Strength)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ada</li> <li>- Tim Koordinasi Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terbentuk</li> </ul> <p><b>Kelemahan (Weakness)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya personil dalam pengawasan dan pemantauan secara berkala</li> </ul>	

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.</p> <p>4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;</p> <p>5. Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;</p>		
Kebijakan dan Strategi Pada Pola Ruang	<p><u>Kebijakan Pola Ruang</u></p> <p>1. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;</p> <p>2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>3. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>4. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- Peningkatan keahlian SDM khususnya terkait pengukuran dan</li> </ul>	<p><u>Kekuatan (Strength)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung (ruang kantor yang luas &amp; kendaraan operasional)</li> <li>- Tersedianya SDM Profesional yang siap</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>pengendalian ruang;</p> <p>5. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya</p> <p>6. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;</p> <p>7. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p> <p><u>Strategi Pola Ruang</u></p> <p>1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;</p> <p>2. Mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;</p> <p>3. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.</p> <p>4. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin</p>	<p>pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</p>	<p>di latih</p> <p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatasnya sarana pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- SDM yang ada belum memiliki keahlian khusus terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;</p> <p>6. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;</p> <p>7. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;</p> <p>8. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;</p> <p>9. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;</p> <p>10. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung</p>		

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>perwujudan ketahanan pangan;</p> <p>11. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;</p> <p>12. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.</p>		
Kebijakan dan Strategi Pada Kawasan Strategis	<p><i>Kebijakan Kawasan Strategis</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.</li> <li>2. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar;</li> <li>3. Pengembangan dan peningkatan fungsi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan &amp; pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>- Peningkatan nilai kawasan</li> <li>- Peningkatan nilai ekonomi masyarakat disekitar kawasan</li> </ul>	<p><u>Kekuatan (Strength)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya tenaga-tenaga operasional hingga ditingkat UPTD dan Balai</li> </ul> <p><u>Kelemahan (Weakness)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya tenaga dan dukungan sarana prasarana karena</li> </ul>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	<p>kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;</p> <p>4. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;</p> <p><u>Strategi Kawasan Strategis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;</li> <li>2. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;</li> <li>4. Meningkatkan kepariwisataan;</li> <li>5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;</li> <li>6. Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk</li> </ol>		<p>luasnya kawasan yang dikelola</p>

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas SKPD/OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan SKPD/OPD
	pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;		

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada hasil analisis SWOT (faktor internal; kekuatan dan kelemahan) berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/OPD. Lebih rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 15 Penentuan Isu-isu strategis

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD/OPD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan RPPLH, KLHS, dan KRP</li><li>- Penyusunan Rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li><li>- Penyusunan rencana pengelolaan limbah B3</li><li>- Inventarisasi izin PPLH</li><li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li><li>- Inventarisasi dan penyelesaian pengaduan dan konflik terkait lingkungan hidup</li><li>- Penyelenggaran Diklat dan penyuluhan</li><li>- Inventarisasi dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup</li><li>- Pengelolaan Sampah dan penetapan TPA</li><li>- Implementasi KEHATI</li><li>- Peningkatan program rehabilitasi</li><li>- Peningkatan program perlindungan tumbuhan</li><li>- Peningkatan kapasitas SDM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kualitas lingkungan hidup</li><li>- SDM &amp; Infrastruktur</li><li>- Konflik kawasan hutan</li><li>- Keanekaragaman hayati</li><li>- Masyarakat Hukum Adat (MHA)</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan program pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD/OPD</li> <li>- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup&amp; kehutanan</li> </ul>	
2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD</li> <li>- Peningkatan Infrastruktur</li> <li>- Peningkatan akses pendidikan</li> <li>- Peningkatan akses kesehatan</li> <li>- Peningkatan pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM, kapasitas kelembagaan &amp; infrastruktur</li> <li>- Akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi</li> </ul>
3	Telaahan Renstra Kementerian LHK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana prasarana pengukuran &amp; pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>)</li> <li>- Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga surveyor dan laboran terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD terkait pengukuran &amp; pemantauan kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana prasarana pengukuran &amp; pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>)</li> <li>- SDM &amp; kapasitas kelembagaan</li> </ul>

4	Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perizinan permukiman dan jaringan</li> <li>- Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan khususnya permukiman dan jaringan</li> <li>- Peningkatan Peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- Peningkatan keahlian SDM khususnya terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)</li> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan &amp; pelestarian keanekaragaman hayati</li> <li>- Peningkatan nilai kawasan</li> <li>- Peningkatan nilai ekonomi masyarakat disekitar kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan &amp; pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>- Peralatan pengukuran (<i>digital equipment</i>)</li> <li>- Nilai ekonomi kawasan hutan</li> </ul>
---	--	---	--

## **BAB IV**

#### **4.1 Visi dan Misi SKPD/OPD**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, terhadap apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi sangat terkait dengan organisasi/lembaga ataupun bidang kajian. Dengan kata lain, visi merupakan *ultimate goal* atau keinginan akhir yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu dari suatu kelembagaan/organisasi ataupun bidang kajian. Visi SKPD/OPD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD/OPD pada akhir periode Renstra SKPD/OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Secara konseptual, penyusunan Visi SKPD/OPD sangat terkait dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”, serta terkait pula dengan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup Yang Handal Dan Proaktif, Serta Berperan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, Dengan Menekankan Pada Ekonomi Hijau”.

Dengan demikian, dalam penyusunan visi dan misi DLHK Propinsi Banten, tidak bisa terlepas dari kedua visi tersebut. berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan provinsi banten, yang ditertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam 5 (lima)tahun kedepan, maka visi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”.

Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain.

Kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-proram yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang.

Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada saat ini tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi sumberdaya tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi DLHK DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi SKPD/OPD. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi dalam mewujudkan visinya. Misi juga memberikan arah dan batasan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD adalah pernyataan lembaga/organisasi tentang

apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi lembaga/organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran terkait apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Propinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

**Tabel 16** Visi dan Misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>
1	2
Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaql Karimah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</li> </ol>

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD/OPD**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD/OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan

sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 seperti terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 17** Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2017-2022

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1	2	3
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas

**Tabel 18** Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-						Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	60	70	75	85	88	90	90	

2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67	44.17	44.67	45.17	45.67	46.17	46.17
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6	31.21	31.71	32.21	32.71	33.21	33.21

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perangkat daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan sasaran utama. Pertama, tujuan menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim, sasarnya adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Provinsi Banten. Pada tahun 2017 IKLH Provinsi Banten mencapai 43,67 point diharapkan ada kenaikan IKLH sebesar 0,5 point dengan demikian pada akhir masa RPJMD dan Renstra IKLH Provinsi Banten menjadi 46,17 point.

Kedua, menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya, sasarnya meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan indikator Rasio Cakupan Tutupan Hutan. Pada tahun 2017 Rasio Tutupan Hutan adalah 30,85%, pada akhir RPJMD dan Renstra DLHK Rasio Cakupan Tutupan Hutan menjadi 33,21%.

Yang terakhir, tujuan ketiga dari Renstra DLHK adalah mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2017-2022 diharapkan IKM pada tahun 2018 senilai 2,80 dan pada akhir tahun RPJMD dan Renstra menjadi 3,60 point dengan skala 4.

Perhitungan Indikator Sasaran DLHK Provinsi Banten untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Rasio Cakupan Tutupan Hutan adalah sebagai berikut :

### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

<b>IKLH UNTUK setiap PROVINSI</b>	
<b>IKLH_Provinsi</b> = (IPA×30%)+(IPU×30%)+(ITH×40%)	
dimana: IKLH_Provinsi = Indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi IPA = Indeks pencemaran air IPU = Indeks pencemaran udara ITH = Indeks tutupan hutan	

5.8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
------	---	---

### 2. Rasio Cakupan Tutupan Hutan

$$\text{Rasio Cakupan Tutupan Hutan} = \frac{KH + TH \text{ diluar Kawasan}}{\text{Luas Provinsi}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Tutupan Hutan di luar KH adalah Hutan diluar KH yang kerapatan Vegetasinya diatas 50%
2. Identifikasi kerapatan vegetasi menggunakan metode/tehnik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dari citra landsat 8 tahun 2016
3. Luas Provinsi menggunakan Sumber data dari BPS/Banten Dalam Angka

Keterangan :

TH = Tutupan Hutan  
KH = Kawasan Hutan

## **BAB V**

### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan. Strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Strategi**

Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Untuk itu telah dipilih beberapa strategi yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program yang akan ditetapkan. Strategi ini didapat berdasarkan jumlah skor yang strategis yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan mitra strategis;
2. Meningkatkan teknologi dan metode penataan lingkungan serta pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil Hutan melalui pengelolaan dan Konservasi Hutan;

#### **B. Kebijakan**

Kebijakan pokok yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas kelembagaan;

2. Mendorong peningkatan fungsi laboratorium untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup;
3. Mendorong peningkatan kualitas lingkungan (kualitas air, udara dan vegetasi) melalui pengelolaan sampah dan limbah B3 serta pengendalian pencemaran dan kerusakan serta pemeliharaan lingkungan hidup;
4. Mendorong peningkatan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan, peningkatan pelayanan pengaduan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas.
5. Meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindungan melalui peningkatan perencanaan dan penatagunaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan, serta Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan.
6. Meningkatkan fungsi hutan dan kawasan lindungan serta kesadaran masyarakat melalui pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan.

**Tabel 19** Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Menurunkan pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas udara dan air sungai serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung melalui Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan DAS, Konservasi SDA dan Ekosistem serta Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, aneka usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat
			Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan

**Tabel 20** Kebijakan Umum dan Program

No	Sasaran	Strategi dan Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	60.0 Nilai	90.0 Nilai	Program Tata Kelola Pemerintahan	Lingkungan Hidup

2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67 %	46.17 %	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
---	---	--	----------------------------------	---------	---------	--	------------------

No	Sasaran	Strategi dan Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	<p>Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, aneka usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat</p> <p>Peningkatan fungsi hutan</p>	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6 %	33.21 %	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Kehutanan

No	Sasaran	Strategi dan Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan					

Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

I. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator kinerja :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 51 point, diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 53,50 point.
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 58.80 point, diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 59,80 point.
- c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kondisi awal pada tahun 2017 terdapat 203 kelompok, kondisi akhir yang diharapkan pada tahun 2017 menjadi 334 kelompok.

II. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan indikator :

- a. Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi, kondisi awal pada tahun 2017 Lahan kritis yang direhabilitasi adalah 69.446 Ha, pada tahun 2022 ditargetkan kondisi akhir Lahan Kritis yang direhabilitasi sebesar 94.466 Ha.
- b. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, pada tahun 2017 kondisi awal fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 38% diharapkan kontribusi fungsi hutan bagi masyarakat menjadi 48%.

III. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : skala 1-4). Kondisi awal pada tahun 2017 belum ada kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga nilainya 0 point, dengan adanya program dan kegiatan yang disusun dalam REnstra DLHK 2017-2022 diharapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi 3,6 point.

## **BAB VI**

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

#### A. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup
4. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
5. Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum LHK
6. Peningkatan Kapasitas LH
7. Jaminan Mutu Laboratoruim Lingkungan
8. Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan

#### B. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan

1. Perencanaan dan Penatagunaan Hutan
2. Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan
3. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
4. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
6. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
8. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
9. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Pandeglang
10. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Serang dan Cilegon
11. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lebak

12. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Tangerang
13. Seksi Perlindungan & Rehabilitasi Kawasan TAHURA
14. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA

### **C. Program Tata Kelola Pemerintahan**

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Penyusunan Data Sektoral
4. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
6. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
7. Peningkatan kapasitas aparatur
8. Koordinasi kedalam dan keluar daerah
9. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
10. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Laboratorium
12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT Laboratorium
13. Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada UPT Laboratorium
14. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada BPPTK
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPPTK
16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPPTK
17. Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada BPPTK

18. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada BPHW Pandeglang Serang Cilegon
19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPHW Pandeglang Serang Cilegon
20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPHW Pandeglang Serang Cilegon
21. Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada BPHW Pandeglang Serang Cilegon
22. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada BPHW Lebak Tangerang
23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPHW Lebak Tangerang
24. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPHW Lebak Tangerang
25. Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada BPHW Lebak Tangerang
26. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Balai Pengelolaan Tahura
27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pengelolaan Tahura
28. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pengelolaan Tahura
29. Koordinasi kedalam dan keluar daerah pada Balai Pengelolaan Tahura

## **6.2 Indikator Kinerja**

- A. Indikator Kinerja Program (Outcome)
  1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air
  2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara
  3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Peningkatan luas lahan kritis yang terehabilitasi
5. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat
6. Tercapainya Laporan Akuntabilitas Kegiatan

B. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

1. Pemantauan kualitas air pada sungai
2. Pemantauan kualitas udara ambien
3. Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran
4. Pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan
5. Pemantauan kerusakan lingkungan
6. Penyusunan kebijakan dan strategi dalam penanganan sampah
7. Kerjasama pengelolaan sampah
8. Penerbitan pertimbangan teknis izin/rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3
9. Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelola limbah B3
10. Update data dan informasi keanekaragaman hayati
11. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
12. Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari
13. Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten
14. Pembinaan kampung iklim terpadu
15. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK sektor limbah
16. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

17. Penyusunan dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
18. Penyusunan NSDA/IKLH/SLHD
19. Penilaian mutu Dokumen Lingkungan Hidup oleh KPA Provinsi
20. Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
21. Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
22. Pembinaan peduli dan berbudaya lingkungan di Sekolah
23. Pembinaan dan penilaian Kota berwawasan lingkungan di provinsi Banten
24. Pembinaan pada pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat
25. Jumlah Parameter Terakreditasi sebanyak 40 parameter Sampai dengan 2021
26. Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan
27. Jumlah Pengujian dan Analisa Sample Uji
28. Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan
29. Perencanaan kehutanan
30. Pemantapan kawasan hutan
31. Terwujudnya Kelompok Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat berbasis industri
32. Tertibnya penatausahaan hasil hutan
33. Pengembangan aneka usaha kehutanan
34. Pengembangan kawasan bambu terpadu

35. Promosi aneka usaha kehutanan
36. Perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan
37. Meningkatkan luas lahan yang terrehabilitasi
38. Meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS
39. Meningkatkan luas ruang terbuka hijau (RTH)
40. Pembentukan dan pembinaan forum DAS
41. Pembinaan masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi
42. Pembentukan lembaga konservasi
43. Terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar
44. Terpulihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi
45. Tersedianya data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem esensial
46. Terlaksananya Perencanaan Taman KEHATI Banten
47. Terlaksananya perencanaan pembentukan lembaga konservasi ex situ (kebun binatang)
48. Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh kehutanan
49. Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan
50. Terbentuknya dan berkembangnya kelembagaan kelompok tani hutan
51. Peningkatan peran serta kader konservasi dan pencinta alam
52. Tersedianya data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan
53. Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPHW Pandeglang
54. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan BPHW Pandeglang

55. Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan Kayu BPHW Pandeglang
56. Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi BPHW Pandeglang
57. Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPHW Cilegon
58. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan BPHW Cilegon
59. Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan Kayu BPHW Cilegon
60. Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi BPHW Cilegon
61. Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPHW Lebak
62. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan BPHW Lebak
63. Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan Kayu BPHW Lebak
64. Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi BPHW Lebak
65. Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPHW Tangerang
66. Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan Kayu BPHW Tangerang
67. Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi BPHW Tangerang
68. Jumlah Ketersediaan Bibit Tanaman Kehutanan
69. Jumlah Penelusuran Sumber Benih Unggul
70. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan Tanaman Kehutanan
71. Jumlah Identifikasi Jenis Tanaman Endemik Banten
72. Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman

73. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS
74. Pembinaan pengadaan pengedar bibit tanaman hutan
75. Pengawasan benih tanaman hutan
76. Sertifikasi bibit/benih tanaman hutan dan MPTS
77. Peningkatan kapasitas SDM pengawas benih tanaman kehutanan
78. Penyediaan sarana prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman
79. Terciptanya Perlindungan kawasan TAHURA
80. Terrehabilitasinya Kawasan TAHURA
81. Tersedianya koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punah
82. Terwujudnya peningkatan kunjungan TAHURA Banten
83. Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata

### **6.3 Kelompok Sasaran**

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 ditujukan untuk kelompok sasaran:

1. Kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan dan merusak hutan.
2. Kelompok masyarakat/stakeholders yang berperan aktif dalam usaha pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat Propinsi Banten secara umum.

### **6.4 Pendanaan Indikatif**

**Tabel 21.** Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)		NPV/LYS	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI					
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)							
									Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)						
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga lautan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	120	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan					13,142,300.00		13,405,100.00		14,294,700.00		14,105,200.00		13,380,200.00		68,327,500.00						
					1 Indeks Kualitas Air				Nilai	51.00	51.50		52.00		52.50		53.00		53.50		53.50					
					2 Indeks Kualitas Udara				Nilai	58.80	59.00		59.20		59.40		59.60		59.80		59.80					
					3 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				Kelompok/ Lembaga	203.00	52.00		60.00		68.00		76.00		78.00		334.00					
					1 Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup																					
					Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan				%	100	100	2,907,657.00	100	2,962,031.00	100	3,143,520.00	100	2,472,535.00	100	2,228,998.50	100	13,714,741.500				
					1 Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota				dok	0	1		0		0		0		0	-	1					
					2 Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri				dok	0	1		0		0		0		0	-	1					
					3 Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)				dok	0	5		0		0		0		0	-	5					
					4 Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai				dok	0	1		0		0		0		0	-	1					
					5 Pemantauan Kualitas Air Laut				lokasi	0	2		0		0		0		0	-	2					
					6 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri				peserta	0	2		0		0		0		0	-	2					
					7 Pemantauan Kualitas air (sungai, danau dan laut)				lokasi	0	0		7		7		7		7	-	28					
					8 Pemantauan kualitas udara ambien				lokasi	22	22		22		22		22		22	-	22					
					9 Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran				dok	0	0		1		1		1		1	-	4					
					10 Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan				ind	40	120		120		120		120		120	-	600					
					11 Pemantauan kerusakan Situ/Danau				lokasi	0	0		10		10		10		10	-	40					
					2 Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3							100%	100%	1,303,764	100%	1,340,012	100%	1,459,100	100%	1,554,000	100%	1,478,200	100%	7,135,076.00		
					Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3																					
					1 Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah				dok	0	1		0		0		0		0		1					
					2 Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jaringan dalam				dok	-	1		0		0		0		0		1					
					3 pembinaan teknis pengelolaan limbah B3				peserta	0	40		0		0		0		0		40					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)		SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT PELAKSANA	LOKASI										
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Target		Rp. (‘000)									
									Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)										
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
2	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	4 Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	5 Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan Limbah B3	6 Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Industri, fasayankes dan hotel)	7 Pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	8 Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	9 Pembinaan Pengelolaan sampah	10 Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan limbah B3	dok	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3									
									ind	-	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25												
									penghasil limbah B3	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75												
									dok	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1												
									dok	-	0	1	1	1	1	2	2	2	6													
									lembaga	2	0	8	8	8	8	8	8	8	8													
									ind	40	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah	1 Penyusunan profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	2 Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	3 Sosialisasi terpadu kampung iklim	4 Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	5 Studi kelayakan pembentukan kawasan	6 Rapat koordinasi program pemuliharan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	7 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	8 Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	9 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	10 Perencanaan dan pembentukan pusat mangrove provinsi banten	11 Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	12 Pembinaan kampung iklim terpadu	13 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	%	100	100	2,355,646	100	2,410,018	100	2,596,080	100	1,353,665	100	1,264,099.50	100	9,979,508.50			Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
									Dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
									dok	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1												
4	Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilaian Amdal	2 Pemantapan RPP LH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten															7,068,276												

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI		
									Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)						
						Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4						4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	dok	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
						5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan	dok	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
						6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	dok	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-			
						7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	dok	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
						8 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	dok	8	-	7	7	7	8	8	8	8	30	-	-				
						9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	dok	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	-	-			
						10 Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	orang	130	-	130	130	130	130	130	130	130	520	-	-				
						5 Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan LH serta pengawasan thd usaha yang memiliki ijin Lingkungan	%	100	100	1,351,882	100	1,370,006	100	1,432,000	100	1,840,000	100	1,763,000,00	100	7,756,888		
						1 Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	saha/kegiatan	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40		Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan			
						2 Penanganan Kasus - kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan oleh tim pos pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	kasus	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20						
						3 Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	orang	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40		Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				
						4 Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	orang	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40						
						5 Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	dok	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				
						6 Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan LH di provinsi banten	ind	0	165	0	0	0	0	0	0	0	165						
						7 Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	ind	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80		Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				
						8 Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100						
						9 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	ind	200	0	310	330	330	350	350	350	350	350		Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT PELAKSANA	LOKASI								
									INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)		2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Target		Rp. (‘000)					
									Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)	Target	Rp. (‘000)								
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
II	Menjaga lautan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya	Peningkatan Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Meningkatnya lauas lahan yang terehabilitasi		Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan					7,744,000.00			7,898,900.00			8,423,100.00			8,311,400.00			7,884,200.00		40,261,600.00						
			Meningkatnya fungsi hutan dan			1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Ha)	ha	69,466	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		94,466									
						2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan: %)	%	38.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		48.00		-							
					1	Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Hutan																								
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan pemantapan kawasan hutan	%	100	100		420,000	100	727,714	100	747,150	100	743,034	100	727,210.00	100		3,365,108								
						1 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	dok	1	1		0		0		0		0		0		1									
						2 Penyusunan Statistik Kehutanan	dok	1	1		0		0		0		0		0		1									
						3 Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten	dok	0	1		0		0		0		0		0		1									
						4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca	dok	1	1		0		0		0		0		0		1									
						5 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	dok	0	5		0		0		0		0		0		5									
						6 Perencanaan Kehutanan	dok	2	0		6		5		4		4		19											
						7 Pemantapan kawasan hutan	KPH	6	0		6		6		6		6		6		6									
					2	Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan																								
						Terlaksananya penatausahaan hasil hutan yang lestari		100%	100%		535,500	100%	820,582	100%	839,996	100%	835,860	100%	820,036.00	100%	3,851,974									
						1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU	Kelompok	0	21		0		0		0		0		0		21									
						2 Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu per Unit - unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU)	dok	0	1		0		0		0		0		0		1									
						3 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Industri	0	50		0		0		0		0		0		50									
						4 Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan luran Kehutanan (WASGANISAN GANIS PHPL)	Industri	0	90		0		0		0		0		0		90									
						5 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat berbasis industri	Kelompok	15	0		20		20		20		20		20		80									
						6 penatausahaan hasil hutan	Industri	180	180		0		180		180		180		180		180									
					3	Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan																								
						Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan	%	100	100		430,500	100	589,432	100	618,553	100	612,348	100	588,613.00	100	2,839,446									
						1 Pameran Indogreen Forestry Expo	komoditas	1	6		0		0		0		0		0		6									
						2 Pameran Banten Expo	komoditas	1.00	6		0		0		0		0		0		6.0									
						3 Pelatihan Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula Semut	orang	0	80		0		0		0		0		0		80									
						4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	orang	0	40		0		0		0		0		0		40									
						5 Pelatihan Budidaya Lebah Madu	orang	-	20		0		0		0		0		0		20.0									
						6 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	kelompok usaha	36	0		3		3		3		3		3		12									
						7 Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu	dok	-	0		1		1		1		1		1		4.0									
						8 Promosi Aneka Usaha Kehutanan	Kegiatan	2	0		3		3		3		3		3		12									
					4	Kegiatan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan																								
						Terlaksananya pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan		100%	100%		493,500	100%	451,897	100%	500,432	100%	490,087	100%	450,532.00	100%	2,386,448									
						1 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	dok	3	2		2		2		2		2		2		10									
						2 Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	ha	-	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		5,000									
						3 Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS)	DAS	0	1		1		1		1		1		1		5									
						4 Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	batang	3000	3000		3000		3000		3000		3000		3000		15,000									

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME )		SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT PELAKSANA	LOKASI									
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Target		Rp. (,000)								
									Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)									
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				4	Kegiatan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	5	Forum	5	5		6		6		7		7		7				Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
					Pembinaan Forum DAS dan Rehabilitasi Lahan (RPRHL)	Forum	5	5		6		6		7		7		7													
				5	Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Terlakukannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi		100%	100%	448,350	100%	486,569	100%	544,811	100%	532,397	100%	484,931,00	100%	2,497,058											
					1 Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata Alam di Daerah Penyanga Kawasan Konservasi	angkatan	0	2		0		0		0		0		0		2											
					2 Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di Provinsi Banten	unit	0	1		0		0		0		0		0		1											
					3 Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	angkatan	0	1		0		0		0		0		0		1											
					4 Sosialisasi Mitigasi Bencana di Sekitar Kawasan Hutan	angkatan	-	2		0		0		0		0		0		2											
					5 Pembinaan masyarakat penyanga kawasan konservasi	kelompok	10.00	4		10		10		10		10		10		44											
					6 Pembentukan lembaga konservasi	unit	-	0		1		1		1		1		1		4											
					7 Pembinaan Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	orang	50.00	0		50		50		50		50		50		200											
					8 Pemulihan kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	unit	0	1		1		1		1		1		1		5											
					9 Pengelolaan data dan informasi kawasan	paket	0	1		1		1		1		1		1		5											
					10 Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten	dok	0	0		1		1		1		1		1		4											
					11 Perencanaan pembentukan lembaga konservasi ex situ	dok	0	0		1		2		1		1		1		5											
				6	Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan usaha dan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA	%	100	100	273,000	100	358,281	100	406,816	100	396,471	100	356,916,00	100	1,791,484											
					1 Bimbingan Teknis Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat	orang	0	100		0		0		0		0		0		100											
					2 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	KTH	0	10		0		0		0		0		0		10											
					3 Lomba Wana Lestari	event	0	1		0		0		0		0		0		1											
					4 Pelatihan Dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	KTH	0	5		0		0		0		0		0		5											
					5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan	orang	0	50		0		0		0		0		0		50											
					6 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan	kelompok	35	0		56		63		70		70		70		70											
					7 Peningkatan Peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	kelompok	34	0		56		63		70		70		70		70											
					8 Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	orang	0	0		100		120		150		150		150		520											
					9 Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	kelompok	34	0		43		46		49		49		49		49											
					10 Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	dok	1	0		1		1		1		1		1		4											
		7	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	%	100	100	1,102,500	100	1,213,537	100	1,252,365	100	1,244,089	100	1,212,445,00	100	6,024,936													
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		-		-		-		-		-		50											
					2 Pembuatan Kebun Bibit Desa	unit	0	8		0		0		0		0		0		8											
					3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40		0		0		0		0		0		40											
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		1250		1250		1250		1,250		5,000													

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI		
									2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)				
									Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)			
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7					Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	kelompok	0	-		20		20		20		20		80				
						6 Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	32	0		32		32		32		32		32				
						7 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/ Pengedar	0	0		5		5		5		5		5				
						Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah	%	100	100	728,700	100	809,025	100	847,853	100	839,577	100	807,933,00	100	4,033,088			
						1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		-	-	-	-	-	-	-	-	50				
						2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	batang	0	1000		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000				
						3 Pembuatan Kebun Bikit Desa	unit	0	5		0	0	0	0	0	0	0	0	5				
						4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	80		0	0	0	0	0	0	0	0	80				
						5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		750		750		750		750		3,000				
						6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	kelompok	5	-		9		9		9		9		36				
8					Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	7 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	industri	60	0		81		81		81		81		81				
						8 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/ Pengedar	5	0		10		10		10		10		40				
						Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak	%	100	100	1,633,000	100	702,787	100	744,615	100	733,339	100	701,695,00	100	4,512,436			
						1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		-	-	-	-	-	-	-	-	50				
						2 Pembuatan Kebun Bikit Desa	unit	0	10		0	0	0	0	0	0	0	0	10				
						3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40		0	0	0	0	0	0	0	0	40				
						4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		1950		1950		1950		1,950		7,800				
						5 Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	0	0		21		21		23		23		23				
						6 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/ Pengedar	20	0		20		20		20		20		20				
						Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang	%	100	100	203,700	100	194,997	100	224,118	100	217,911	100	194,178,00	100	1,034,904			
11					Kegiatan Pengembangan Pembentahan Tanaman Hutan	1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		-	-	-	-	-	-	-	-	50				
						2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	batang	0	7000		0	0	0	0	0	0	0	0	7,000				
						3 Pembuatan Sumur Resapan	unit	0	25		0	0	0	0	0	0	0	0	25				
						4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40		0	0	0	0	0	0	0	0	40				
						5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		50		50		50		50		200				
						6 Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	60	0		82		82		82		82		82				
						7 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/ Pengedar	0	0		20		20		20		20		20				
12					Kegiatan Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan		100%	100%	262,500	100%	310,896	100%	369,138	100%	356,724	100%	309,258,00	100%	1,608,516	Seksi Pengembangan Benih Unggul Bermutu		
						1 Penyediaan Bibit Tanaman hutan dan MPTS	Bibit	145,000	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		1,000,000				
					Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	2 Penelusuran Sumber Benih unggul	Jenis	0	1		1		1		1		1		5				
						3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan tanaman hutan dan MPTS	Orang	0	80		80		80		80		80		400				
						4 Identifikasi jenis tanaman endemik Banten	Dokumen	0	-		1		-		1		1		3				
						5 Pembangunan dan Peneliharaan kebun sumber benih tanaman kehutani unggul	Ha	0	3		3		4		5		5		5				
						6 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS	Kab/Kota	8	8		8		8		8		8		8				
					Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	1 Pembinaan Pengadaan Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Org/Pengelola	11	26		30		35		40		40		40		647,830		



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME )	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT PELAKSANA	LOKASI			
								2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Target		Rp. (,000)				
								Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)			
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlaul karimah dengan			2 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	dok	17	16	300,000	16	300,000	16	303,000	16	303,000	17	306,030,00	17	1,512,030,00	81						
				1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan		dok	3	3			3		3		3		3		3		15	-			Sub Bag PEP	
				2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan		dok	9	9			9		9		9		9		9		45	-				
				3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian		dok	4	4			4		4		4		4		4		20	-				
				4 Penyusunan Renstra		dok	1	0			0		0		0		0		1		1	-				
				3 Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	dok	8	5	450,000	5	450,000	5	454,500	5	454,500	5	459,045,00	25	2,268,045,00							Sub Bag PEP
				1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah		dok	1	1			1		1		1		1		1		5					
				2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah		dok	0	1			1		1		1		1		1		5					
				3 pengelolaan PPID		dok	1	1			1		1		1		1		1		5					
				4 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		dok	1	-			1		1		1		1		1		4					
				5 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial		dok	0	1			1		1		1		1		1		5					
				4 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	paket	1	1	300,000	1	303,000	1	306,030	1	199,970	1	201,969,70	1	1,310,969,70							
				1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		paket	1	1			1		1		1		1		1		5					
				5 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	0	12	2,213,800	12	2,213,800	12	2,435,938	12	2,435,938	12	2,460,297,38	12	11,759,773,38							
				1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		bulan	0	12			12		12		12		12		12		12					
				2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		bulan	0	12			12		12		12		12		12		12					
				6 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan	aparatur	12	12	5,500,000	12	5,472,500	12	5,827,225	12	5,885,497,25	12	5,944,352,223	12	28,629,574,473							Sub Bag Umpem DLHK
				1 Operasional kantor Tidak tetap		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				2 Penyediaan Barang Habis Pakai		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				3 Penyediaan Bahan Cetak		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				7 Penyediaan BBM		bulan	12	12			12		12		12		12		12		12					
				7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	aparatur	173	173	200,000	173	202,000	173	204,020	173	204,020	173	206,060,200	173	1,016,100,200							
				1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaiann		aparatur	173	173			173		173		173		173		173		173					
				2 Peningkatan Kompetensi Aparatur		aparatur	1	173			173		173		173		173		173		173					
				8 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	bulan	12	12	1,900,000	12	1,919,000	12	1,938,190	12	1,938,190	12	1,957,571,900	12	9,652,951,900							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI	
									2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)			
									Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)		
1	2	5	6	8	Kegiatan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	bulan	12	12	50,000	12	50,500	12	51,005	12	51,005	12	51,515,05	12	254,025,050	Sub Bag Umpeg DLHK	
						1 Pengelolaan Kearsipan Dinas	bulan	-	12		12		12		12		12		12			
						2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas	bulan	-	12		12		12		12		12		12			
						Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	paket	0	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020	1	374,072.200	5	1,184,112.200		
						1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Paket	-	1		1		1		1		1		5			
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	bulan	12	12	400,000	12	404,000	12	422,789	12	427,016.89	12	431,287.059	12	2,085,092.949		
						1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium	unit	-	52		0		0		0		0		0		52	
						Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	bulan	0	12	500,000	12	505,000	12	610,050	12	610,050.00	12	616,150.500	12	2,841,250.500	Sub Bag TU UPT Lab	
						1 Operasional Perkantoran	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						3 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						6 Penyediaan BBM	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
						7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	12.00	12		12		12		12		12		12			
					Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	bulan	12	12	130,000	12	131,300	12	132,613	12	132,613.00	12	133,939.130	12	660,465.130		
						1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
					Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK	paket	1	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020.00	1	206,060.200	5	1,016,100.200	Sub Bag TU UPT Lab	
						1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	-	1		1		1		1		1		5			
						2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor	paket	-	1		0		0		0		0		1			
					Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai PPTK	bulan	12	12	300,000	12	303,000	12	306,030	12	306,030	12	309,090.300	12	1,524,150.300		
						1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME )	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI			
								INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)		2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)			
								Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16				Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK	bulan	12	12	400,000	12	404,000	12	458,040	12	462,620.40	12	467,246.604	12	2,191,907.004	Sub Bag TU BPPTK			
						1	Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						2	Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						3	Operasional kantor tidak tetap	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						4	Penyediaan Bahan Cetak	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						5	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						6	Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
						7	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12			
17				Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tamatan Kehutanan	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PPTK	bulan	12	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010.00	12	103,030.100	12	508,050.100				
						1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		60			
18				Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	bulan	12	12		12		12		12		12		12		60			
						1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	0	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	186,497.96	1	188,362.940	5	980,880.900		
						2		paket	-	1		1		1		1		1		5			
19				Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terpeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	bulan	0	12	150,000	12	151,500	12	153,015	12	153,015.00	12	154,545.150	12	762,075.150				
						1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						3		bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						4	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						5	Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						6	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
20				Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-PSC	bulan	0	12	350,000	12	353,500	12	407,035	12	411,105.35	12	415,216.404	12	1,936,856.754				
						1	Operasional kantor Tidak tetap	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						2	Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						3	Penyediaan Bahan Cetak	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						4	Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						5	Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						6	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
21				Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	bulan	0	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010.00	12	103,030.100	12	508,050.100				
						1	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
						2	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	0	12		12		12		12		12		12			
22				Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-LT	paket	0	1	350,000	1	353,500	1	357,035	1	357,035.00	1	360,605.350	1	1,778,175.350				
						1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	-	1		1		1		1		1		5			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI		
									2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)				
									Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)			
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						23 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan	bulan	0	12	200,000	12	202,000	12	204,020	12	206,060.200	12	208,120.800	12	1,020,201.000	Sub Bag TU BPHW LT		
						1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan	bulan	0	12	400,000	12	404,000	12	408,040	12	412,120.400	12	416,241.604	12	2,040,402.004			
						1 Operasional kantor Tidak tetap	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						3 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan		12		12		12		12		12		12		12		
						5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						7 Penyediaan BBM	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						25 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	bulan	0	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010.000	12	103,030.100	12	508,050.100			
						1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	-	12		12		12		12		12		12		12		
						26 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	bulan	0	12	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020.000	1	206,060.200	5	1,016,100.200	Sub Bag TU TAHURA		
						1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	bulan	1	1		1		1		1		1		1		5		
						27 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	bulan	12	12	250,000	12	252,500	12	255,025	12	257,575.250	12	260,151.003	12	1,275,251.253			
						1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						28 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	bulan	12	12	300,000	12	303,000	12	306,030	12	309,090.300	12	312,181.203	12	1,530,301.503			
						1 Operasional kantor Tidak tetap	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						3 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						7 Penyediaan BBM	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						29 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	bulan	12	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010.000	12	103,030.100	12	508,050.100			
						1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		
						JUMLAH PAGU TOTAL				36,805,100.00		37,269,100.00		39,557,300.00		39,215,400.00		38,399,200.00		191,246,100.000			

## **BAB VII**

**BAB VII****INDIKATOR KINERJA SKPD/OPD  
YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja yang terdapat pada Renstra SKPD/OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten disusun secara sistematis dan terkait satu sama lain dengan misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022. Indikator kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat pada pada Misi ke-5“Pembangunan Ekonomi”.

<i>Misi 5</i>	:	Pembangunan Ekonomi
<i>Sasaran</i>	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</li><li>- Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Perlindungan serta Pemeliharaan Kehutanan</li></ul>
<i>Strategi</i>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup</li><li>2. Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai</li><li>3. Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung</li></ol>
<i>Arah Kebijakan</i>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas Air dan Udara Melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah</li><li>2. Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai</li><li>3. Peningkatan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung serta Kesadaran Masyarakat Peduli Hutan</li></ol>
<i>Program</i>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</li><li>2. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan</li><li>3. Program Tata Kelola Pemerintahan</li></ol>
<i>Kegiatan</i>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</li> <li>3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup</li> <li>5. Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum LHK</li> <li>6. Peningkatan Kapasitas LH</li> <li>7. Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan</li> <li>8. Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan</li> <li>9. Perencanaan dan Penatagunaan Hutan</li> <li>10. Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan</li> <li>11. Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan</li> <li>12. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>13. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem</li> <li>14. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>15. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan</li> <li>16. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan</li> <li>17. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Pandeglang</li> <li>18. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Serang dan Cilegon</li> <li>19. Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lebak</li> <li>20. Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang</li> <li>21. Seksi Perlindungan &amp; Rehabilitasi Kawasan TAHURA</li> <li>22. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA</li> <li>23. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol>
--	--

	<p>24. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset</p> <p>25. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor</p> <p>26. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor</p> <p>27. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</p> <p>28. Rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah</p> <p>29. Peningkatan kapasitas aparatur</p> <p>30. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan</p> <p>31. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</p>
<i>Indikator Kinerja</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Indeks Kualitas Air (Nilai Indeks)</li> <li>- Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (Nilai Indeks)</li> <li>- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kelompok/ Lembaga)</li> <li>- Peningkatan Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Hektar)</li> <li>- Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Persentase)</li> <li>- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

Indikator utama keberhasilan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2017-2022, segaragaris besar meliputi 5 (lima) kriteria utama yakni; peningkatan indeks kualitas air (IKA), peningkatan indeks kualitas udara (IKU), peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan luas lahan kritis yang terehabilitasi dan peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat serta indeks kepuasan masyarakat. Lebih rinci disajikan sebagai berikut:

**Tabel 22** Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Awal pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_R^2}{2}}$ IP <sub>j</sub> = indeks pencemaran bagi peruntukan j, C <sub>i</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i, L <sub>ij</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,	point	51	51,5	52	52,5	53	53,5	53,5	
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IPU = \frac{IPU_{NO2} + IPU_{SO2}}{2}$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2 = Indeks Pencemar NO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2	%	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	59,8	

3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat	Kelompok / Lembaga	203	52	60	68	76	78	231
4	Peningkatan Luas Lahan kritis yang terelabilitasi	• Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha • Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha • Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Ha	69.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	94.466
5	Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	$RPPK = \frac{\text{Produksi Kayu (M3)}}{\text{Kapasitas Terpasang Mesin Industri}} \times 100\%$ RPPK = Rasio Peningkatan Produksi Kayu	%	38	10	10	10	10	10	48
5	Tercapainya Laporan Akuntabilitas Kegiatan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala: 1-4	0,00	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60

## **BAB VIII**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Propinsi Banten Tahun 2017-2022, yang merupakan rangkaian rencanatindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra DLHK Propinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan 4 (empat) tahapan yakni; 1) Tahap Persiapan Penyusunan; 2) Tahap Penyusunan Rancangan Renstra; 3) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra dan 4) Tahap Penetapan Renstra.

Renstra DLHK Propinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif dan *bottom-up/top-down* serta kerangka pendanaan. Sedang pendekatan analisis yang dilakukan meliputi; analisis isi (*content analysis*), analisis kebutuhan (*interpretative structural modeling*), dan analisis SWOT (faktor internal dan eksternal). Pendekatan teknokratis dilakukan dengan kajian-kajian teoritis dan akademik. Pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dilakukan dengan forum renstra serta menerima input/masukan dari seluruh stakeholders yang terkait dengan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedang pendekatan kerangka pendanaan dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Propinsi Banten berbasis anggaran. Dalam artian bahwa program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan

dapat mengikuti/mendukung program-program unggulan kepala daerah terpilih, sehingga alokasi dana/pembiayaan menjadi lebih mudah.

Pendekatan *Content Analysis* atau analisis isi merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menggali keterkaitan kata/kalimat berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/OPD. Analisis kebutuhan merupakan tools analisis ISM (interpretative structural modeling) yakni tools analisis kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/OPD. Analisis SWOT dimaksudkan untuk melihat faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/OPD.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/OPD yakni; 1) Kualitas lingkungan hidup, 2) SDM & Infrastruktur, 3) Konflik kawasan hutan, 4) Keanekaragaman hayati, 5) Masyarakat Hukum Adat (MHA), 6) Akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan 7) Nilai ekonomi kawasan hutan. Selanjutnya dirumuskan visi dan misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022 “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Hutan Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, dengan 3 (tiga) misi utama yakni; 1) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; 2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya Kehutanan melalui Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan hasil hutan berbasis pemberdayaan masyarakat; 3) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan kelembagaan pelayanan informasi Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran yang terdiri atas; 1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim (Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup); 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya (Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan); dan 3) Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat (Sasaran: Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Selanjutnya ditetapkan program dan kegiatan yang terdiri atas; 1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 2) Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan dan 3) Program Tata Kelola Pemerintahan. Program-program tersebut diukur dengan indikator kinerja program (outcome) yang meliputi 6 (enam) indikator utama yakni; 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam satuan poin; 2) Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam satuan poin; 3) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam satuan kelompok/lembaga; 4) Peningkatan Luas Lahan kritis yang terehabilitasi dalam satuan (Ha); 5) Persentase Peningkatan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat dalam satuan (%); 6) Nilai IKM (Satuan: Skala 1-4)

## **LAMPIRAN**

## KERANGKA PENGENDALIAN KINERJA SKPD

NO	TUJUAN	BIDANG	PERMASALAHAN URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNA N DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2018 - 2022)					AKHIR RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
												2016	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Lingkungan hidup dan kehutanan	1 Menurunnya kualitas udara di Provinsi Banten	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas																DLHK
		2 menurunnya kualitas air sungai	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup								Poin	43.67	44.17	44.67	45.17	45.67	46.17	46.17	
		3 Perubahan iklim akibat pemanasan global	Rasio Cakupan Tutupan Hutan							%	30.60	31.21	31.71	32.21	32.71	33.21	33.21		KADIS
		4 Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten																	
		5 Menurunnya kualitas dan																	
		6 Belum optimalnya pemanfaatan hasil Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan																
				1 Menurunkan pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas udara dan air sungai serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan															
				2 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung melalui Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan DAS, Konservasi SDA dan Ekosistem serta Pemberdayaan Masyarakat															
				3 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung															
					1 Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air		poin	51.00	51.50	52.00	52.50	53.00	53.50	53.50	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran	
					2 Meningkatnya Indeks Kualitas Udara		2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara		point	58.80	59.00	59.20	59.40	59.60	59.80	59.80		
					1 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup		3	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup										Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	

1 Pemantauan kualitas air sungai	sungai	3	5	5	5	5	5	5	5
2 Pemantauan kualitas udara ambien	lokasi	22	22	22	22	22	22	22	22
3 Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	dok	-	1	4	1	1	1	1	5
4 Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	ind	40	120	120	120	120	120	120	120
5 Pemantauan kerusakan lingkungan	lokasi	-	3	10	10	10	10	10	43
2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3									
1 Penyusunan kebijakan dan strategi dalam penanganan sampah	dok	-	-	1	1	1	2	5	
2 kerjasama pengelolaan sampah	dok	0	1	2	1	2	2	8	
3 penerbitan pertimbangan teknis izin/rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3	izin	15	4	4	4	4	4	4	20
4 pemantauan dan pembinaan terhadap pengelola limbah B3	ind	40	100	100	100	100	100	100	500
3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup									
1 update data dan informasi keanekaragaman hayati	Dok	-	-	1	1	1	1	1	
2 pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	Lokasi	-	8	8	8	8	8	8	8
3 pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	Lokasi	-	0	10	10	10	10	10	40
4 Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten	lokasi	0	0	1	-	1	-	-	2
5 Pembinaan kampung iklim terpadu	kp	16	16	24	32	40	48	48	
6									
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK sektor limbah	lap	1	1	1	1	1	1	1	5

Program

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup







2	Percentase Peningkatan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat	%	38	10	10	10	10	10	48	Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
1	Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	ha	-	-	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000	Kasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kelompok	-	-	17	20	20	20	77	
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Industri	32	32	32	32	32	32	32	
3	Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	Penangkar/Pengedar	-	-	5	5	5	5	5	
4	Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	-	-	750	750	750	750	3,000	
2	Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	ha	-	-	8	9	9	9	35	
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kelompok	-	-	81	81	81	81	81	
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Industri	-	-	10	10	10	10	40	
3	Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	Penangkar/Pengedar	-	-	2000	2000	2000	2000	10000	
4	Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Ha	-	-	1,950	1,950	1,950	1,950	7,800	
1	Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang terrehabilitasi	%	38	10	10	10	10	10	48	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
2	Percentase Peningkatan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat	Ha	-	-	21	21	21	23	86	Kasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
1	Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	Kelompok	-	-	20	20	20	20	20	
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Industri	-	-	20	20	20	20	20	
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Penangkar/Pengedar	-	-	50	50	50	50	200	
2	Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang	Industri	82	30	82	82	82	82	82	Kasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	-	-	82	82	82	82	82	
2	Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	Ha	-	-	82	82	82	82	82	





3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		0		1	2	1	2	6
1 Operasional Perkantoran	Orang / Bulan	17	169	173	173	173	173	173
2 Penyediaan Barang Habis Pakai	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
3 Penyediaan Bahan Cetak	Jenis / Bulan	12	12	12	12	12	12	12
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
6 Penyediaan BBM	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur								
1 Fasilitasi Administrasi Kepengawahan	dok	3	3	3	3	3	3	15
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	keg	1	1	1	1	1	1	5
5 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah								
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12
<b>Kepala UPT Laboratorium Lingkungan</b>								
1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor								
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD berdasarkan RKBM/ SKPD)	unit	40	22	26	2	1	1	52
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor								
1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	Paket	0	1	1	1	1	1	5
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit / Bulan	0	0	6	8	9	10	10
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium	Bulan / Unit	40	50	52	55	56	58	58
3 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran								
1 Operasional Perkantoran	Orang / Bulan	8	10	12	14	16	18	18
2 Penyediaan Barang Habis Pakai	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
3 Penyediaan Bahan Cetak	Jenis / Bulan	12	12	12	12	12	12	12
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
6 Penyediaan BBM	Bulan	-	-	12	12	12	12	12
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah								
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12

Kasubbag TU  
UPT Lab.



1 Operasional Perkantoran	Orang / Bulan	0	0	0	0	0	0	0
2 Penyediaan Barang Habis Pakai	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
3 Penyediaan Bahan Cetak	Jenis / Bulan	12	12	12	12	12	12	60
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
6 Penyediaan BBM	Bulan	12	12	12	12	12	12	60
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah								
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	60
2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	60
<b>Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang</b>								
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor								
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD berdasarkan RKBMD SKPD)	unit	0	0	20	21	22	22	85
2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor	paket	0	0	2	1	0	0	3
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor								
1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman (Outsourcing)	bulan;paket	-	1	2	2	2	2	2
2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor	Paket	-	1	3	3	3	3	3
3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit / Bulan	-	9	9	9	9	9	9
4 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	Bulan / Unit	-	4	4	24	45	45	67
3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran								
1 Operasional Perkantoran	Orang / Bulan	-	8	8	8	8	8	40
2 Penyediaan Barang Habis Pakai	Bulan	-	3	12	12	12	12	51
3 Penyediaan Bahan Cetak	Jenis / Bulan	-	3	12	12	12	12	51
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	-	2	12	12	12	12	50
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN	Bulan	-	3	12	12	12	12	51
6 Penyediaan BBM	Bulan	-	3	12	12	12	12	21
4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah								
1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	3	12	12	12	12	51

Kasubbag TU  
Pada Balai  
Pengelolaan  
Hutan Wilayah  
Lebak Tangerang



# KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

## Visi :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2			
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	
5	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD  
PERIODE : 2017-2022**

**Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH**

**Misi: 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

**Misi: 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahaniklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Menurunkan pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas udara dan air sungai serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung melalui Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan DAS, Konservasi SDA dan Ekosistem serta Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, aneka usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat
			Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan

# PROVINSI BANTEN

## KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENSTRA SKPD

### PERIODE : 2017-2022

No	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Keterangan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	1.1 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	1 Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	60.0 Nilai	90.0 Nilai	1205.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	Lingkungan Hidup
5.1.1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	5.1 Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67 %	46.17 %	1205.15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
5.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	5.2 Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, aneka usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6 %	33.21 %	2004.15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Kehutanan
		5.3 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan						Program yang dilaksanakan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW, BPPTK

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode (IMPACK)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI				
									INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Target	Rp. (,000)			
									4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	120	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan						13,142,300.00		13,405,100.00			14,294,700.00		14,105,200.00		13,380,200.00			68,327,500.00		
					1	Indeks Kualitas Air		Nilai	51.00	51.50			52.00		52.50		53.00		53.50			53.50			Provinsi Banten
					2	Indeks Kualitas Udara		Nilai	58.80	59.00			59.20		59.40		59.60		59.80			59.80			
					3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/ Lembaga	203.00	52.00			60.00		68.00			76.00		78.00			334.00			
					1	Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup																			
						Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	%	100	100	2,907,657.00	100	2,962,031.00	100	3,143,520.00	100	2,472,535.00	100	2,228,998.50	100	13,714,741.500					
						1	Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota	dok	0	1			0		0		0		0		-	1			
						2	Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	dok	0	1			0		0		0		0		-	1			
						3	Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)	dok	0	5			0		0		0		0		-	5			
						4	Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	dok	0	1			0		0		0		0		-	1			
						5	Pemantauan Kualitas Air Laut	lokasi	0	2			0		0		0		0		-	2			
						6	Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	peserta	0	2			0		0		0		0		-	2			
						7	Pemantauan Kualitas air (sungai, danau dan lautan)	lokasi	0	0	1,128,893	7	1,147,019	7	1,208,520	7	1,310,075	7	1,259,000	28					
						8	Pemantauan kualitas udara ambien	lokasi	22	22	240,941	22	250,003	22	281,000	22	240,615	22	190,000	22					
						9	Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	dok	0	0	1,075,941	1	1,085,003	1	1,116,000	1	533,435	1	510,000	4					
						10	Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	ind	40	120	275,941	120	285,003	120	315,000	120	221,000	120	170,000	600					
						11	Pemantauan kerusakan Situ/Danau	lokasi	0	0	185,941	10	195,003	10	223,000	10	167,410	10	100,000	40					
					2	Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3																			
						Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah B3 dan limbah B3			100%	100%	1,303,764	100%	1,340,012	100%	1,459,100	100%	1,554,000	100%	1,478,200	100%	7,135,076.00				
						1	Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	dok	0	1			0		0		0		0		1				
						2	Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jaringan dalam pengelolaan sampah	dok	-	1			0		0		0		0		1				
						3	pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	peserta	0	40			0		0		0		0		40				
						4	Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	dok	0	1			0		0		0		0		1				
						5	Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan Limbah B3	ind	-	25			0		0		0		0		25				
						6	Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Industri, fasnyakes dan hotel)	penghasil limbah B3	0	75			0		0		0		0		75				
						7	Pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	dok	0	1			0		0		0		0		1				
						8	Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	dok	-	0	551,882	1	570,006	1	629,000	2	862,000	2	863,100	6					
						9	Pembinaan Pengelolaan sampah	lembaga	2	0	225,941	8	235,003	8	264,000	8	221,000	8	170,000	8					
						10	Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan limbah B3	ind	40	0	525,941	100	535,003	100	566,100	100	471,000	100	445,100	100					
					3	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup																			
						Terlaksanannya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah	%	100	100	2,355,646	100	2,410,018	100	2,596,080	100	1,353,665	100	1,264,100	100	9,979,508.50					
						1	Penyusunan profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	Dok	-	1			-		-		-		-	1					
						2	Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	dok	-	1			-		-		-		-	1					
						3	Sosialisasi terpadu kampung iklim	dok	-	1			-		-		-		-	1					
						4	Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	dok	-	1			-		-		-		-	1					
						5	Studi kelayakan pembentukan kawasan	dok	-	1			-		-		-		-	1					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kode PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)		KODE ANALISIS	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT PELAKUAN	LOKASI				
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)							
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6	Rapat koordinasi program pemuliharaan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten				6 Rapat koordinasi program pemuliharaan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	dok	-	1		-			-									Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup				
					7 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	Dok	-	8		-			-													
					8 Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	dok	-	1	275,941	1	285,003	1	315,920	1	71,000	1	78,100	5								
					9 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	Lokasi	-	-	175,941	8	185,003	8	216,160	8	121,000	8	98,000	32								
					10 Perencanaan dan pembentukan pusat mangrove provinsi banten	dok	-	-	575,941	1	585,003	1	616,000	1	-	1	-	4								
					11 Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	lokasi	-	-	175,941	10	185,003	10	216,000	10	121,000	10	98,000	40								
					12 Pembinaan kampung iklim terpadu	kp	16	-	875,941	32	885,003	40	916,000	48	820,500	50	825,000	50								
					13 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	lap	1	1	275,941	1	285,003	1	316,000	1	220,165	1	165,000	5								
					4 Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan		%	100	100	1,353,764	100	1,390,012	100	1,514,000	100	1,545,000	100	1,265,500,000	100	7,068,276					
					1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal	dok	0	1		-			-								1	-				
4	Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan				2 Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	dok	0	1		-			-							1						
					3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten	dok	0	1		0		0		0		0				1	-					
					4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	dok	0	1		-		-		-						1	-					
					5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan	dok	0	1		-		-		-						1						
					6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	dok	0	1		0		0		0		0				1	-					
					7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	dok	0	1		-		-		-						1	-					
					8 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	dok	8	-	260,941	7	270,003	7	301,000	8	420,000	8	385,000	30								
					9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	dok	2	0	240,941	1	250,003	1	281,000	1	185,000	1	130,500	4	1,087,444							
					10 Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	orang	130	-	851,882	130	870,006	130	932,000	130	940,000	130	750,000	520	4,343,888							
5	Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum				Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan LH serta pengawasan thd usaha yang memiliki ijin Lingkungan	%	100	100	1,351,882	100	1,370,006	100	1,432,000	100	1,840,000	100	1,763,000,000	100	7,756,888							
					1 Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	saha/kegiatan	0	40		0		0		0		0			40			Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				
					2 Penanganan Kasus - kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan oleh tim pos pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	kasus	0	20		0		0		0		0			20							
					3 Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	orang	0	40		0		0		0		0			40			Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				
					4 Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	orang	0	40		0		0		0		0			40							
					5 Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	dok	0	1		0		0		0		0			1			Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan				
					6 Pengawasan dan pengendalian terhadap ketatanan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan LH di provinsi banten	ind	0	165		0		0		0		0			165							
					7 Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	ind	0	80		0		0		0		0			80			Seksi Pengaduan				



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)		A/N %	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI				
						INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)								
										Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target						
1	2	5	6	8	2	3	4	5 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Hasil Hutan		19			
									6	2	0	315,000	6	554,352	5	564,081	4	562,033	4	554,121	19					
									7	0	105,000	6	173,362	6	183,069	6	181,001	6	173,089	6						
									8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			</																							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)		A/N %	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI		
						INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)						
						3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	5	6	8	2																			
5	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	orang	0	50			0			0			0		0			50		Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	kelompok	35	0	63,000		56	80,902		63	90,609		70	88,540		70	80,629		70		
			7	Peningkatan Peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	kelompok	34	0	84,000		56	104,017		63	113,724		70	111,655		70	103,744		70		
			8	Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	orang	0	0	52,500		100	80,902		120	90,609		150	88,540		150	80,629		520		
			9	Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	kelompok	34	0	52,500		43	69,345		46	79,052		49	76,983		49	69,072		49		
			10	Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	dok	1	0	21,000		1	23,115		1	32,822		1	30,753		1	22,842		4		
8	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon	1	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	%	100	100		1,102,500	100		1,213,537	100		1,252,365	100		1,244,089	100		1,212,445.00	100	6,024,936
			2	1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50			-			-			-			-			50		
			3	2 Pembuatan Kebun Bibit Desa	unit	0	8			0			0			0			0			8		
			4	3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40			0			0			0			0			40		
			5	4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0	840,000		1250	924,600		1250	934,307		1250	932,238		1,250	924,327		5,000		
			6	5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	kelompok	0	-	210,000		20	231,150		20	240,857		20	238,788		20	230,877		80		
			7	6 Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	32	0	31,500		32	34,672		32	44,379		32	42,310		32	34,399		32		
			8	7 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	0	0	21,000		5	23,115		5	32,822		5	30,753		5	22,842		5		
9	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak	1	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	%	100	100		728,700	100		809,025	100		847,853	100		839,577	100		807,933.00	100	4,033,088
			2	1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50			-			-			-			-			50		
			3	2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	batang	0	1000			0			0			0			0			1,000		
			4	3 Pembuatan Kebun Bibit Desa	unit	0	5			0			0			0			0			5		
			5	4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	80			0			0			0			0			80		
			6	5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0	504,000		750	554,760		750	564,467		750	562,398		750	554,487		3,000		
			7	6 Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	60	0	84,000		81	92,460		81	102,167		81	100,098		81	92,187		81		
			8	7 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	5	0	42,000		10	46,230		10	55,937		10	53,868		10	45,957		40		
10	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang	1	Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	%	100	100		203,700	100		194,997	100		224,118	100		217,911	100		194,178.00	100	1,034,904
			2	1 Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50			-			-			-			-			50		
			3	2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	batang	0	7000			0			0			0			0			7,000		
			4	3 Pembuatan Sumur Resapan	unit	0	25			0			0			0			0			25		
			5	4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40			0			0			0			0			40		
			6	5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0	143,700		50	114,997		50	144,118		50	137,911		50	114,178		200		
			7	6 Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	60	0	30,000		82	40,000		82	40,000		82	40,000		82	40,000		82		
			8	7 Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	0	0	30,000		20	40,000		20	40,000		20	40,000		20	40,000		20		
11	Kegiatan Pengembangan Pemberian Benih Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan	1	1 Penyediaan Bibit Tanaman hutan dan MPTS	Bibit	145,000	200,000		136,500	200,000		143,313	200,000		153,020	200,000		150,951	200,000		143,040	1,000,000		Seksi Pengembangan Benih Unggul Bermutu
			2	2 Penelusuran Sumber Benih unggul	Jenis	0	1	21,000		1	23,115		1	32,822		1	30,753		1	22,842		5		
			3	3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan tanaman hutan dan MPTS	Orang	0	80	52,500		80	40,451		80	50,158		80	48,089		80	40,178		400		
			4	4 Identifikasi jenis tanaman endemik Banten	Dokumen	0	-	-		1	17,336		-	27,043		1	24,974		1	17,063		3		
			5	5 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman kehutanan unggul	Ha	0	3	31,500		3	69,345		4	79,052		5	76,983		5	69,072		5		
			6	6 Monitoring dan Evaluasi Penyalur Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS	Kab/Kota	8	8	21,000		8	17,336		8	27,043		8	24,974		8	17,063		8		
			7	7 Kegiatan Pengembangan Pemberian Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	%	100	100		95,550	100		116,730	100		165,265	100		154,920	100		115,365.00	100	647,830
			8	1 Pembinaan Pengadaan Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Org/Pengelola	11	26	21,000		30	23,115		35	32,822		40	30,753		40	22,842		40		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)		ANNUAL	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI
						INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)				
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III	Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompетensi serta melayani masyarakat	Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kapabilitas																			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)		A/N %	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI					
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)							
									Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)	Target	Rp. (.,000)								
1	2	5	6	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					4 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	paket	1	1	300,000	1	303,000	1	306,030	1	199,970	1	201,969.70	5	1,310,969.70	Sub Bag Umpeg DLHK					
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		paket	1	1	300,000	1	303,000	1	306,030	1	199,970	1	201,969.70	5							
					5 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	0	12	2,213,800	12	2,213,800	12	2,435,938	12	2,435,938	12	2,460,297.38	12	11,759,773.38						
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		bulan	0	12	1,913,800	12	1,913,800	12	2,035,938	12	2,035,938	12	2,061,235.38	12							
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		bulan	0	12	300,000	12	300,000	12	400,000	12	400,000	12	399,062.00	12							
					6 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan	aparatur	12	12	5,500,000	12	5,472,500	12	5,827,225	12	5,885,497.25	12	5,944,352.223	12	28,629,574.473						
					1 Operasional kantor Tidak tetap		bulan	12	12	920,000	12	892,500	12	1,000,000	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	12							
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai		bulan	12	12	1,230,000	12	1,230,000	12	1,275,000	12	1,300,000.00	12	1,320,000.00	12							
					3 Penyediaan Bahan Cetak		bulan	12	12	325,000	12	325,000	12	340,000	12	340,000.00	12	340,000.00	12							
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		bulan	12	12	960,000	12	960,000	12	980,000	12	980,000.00	12	1,000,000.00	12							
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		bulan	12	12	100,000.0	12	100,000.0	12	100,000.0	12	100,000.00	12	100,000.00	12							
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		bulan	12	12	1,400,000.0	12	1,400,000.0	12	1,562,225.0	12	1,565,497.25	12	1,584,352.223								
					7 Penyediaan BBM		bulan	12	12	565,000	12	565,000	12	570,000	12	600,000.00	12	600,000.00	12							
					7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	aparatur	173	173	200,000	173	202,000	173	204,020	173	204,020	173	206,060.200	173	1,016,100.200						
					1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		aparatur	173	173	100,000	173	101,000	173	102,010	173	102,010	173	103,030.100	173							
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur		aparatur	1	173	100,000	173	101,000	173	102,010	173	102,010	173	103,030.100	173							
					8 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	bulan	12	12	1,900,000	12	1,919,000	12	1,938,190	12	1,938,190	12	1,957,571.900	12	9,652,951.900						
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		bulan	12	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000.00	12							
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		bulan	12	12	900,000	12	919,000	12	938,190	12	938,190	12	957,571.900	12							
					9 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	bulan	12	12	50,000	12	50,500	12	51,005	12	51,005	12	51,515.05	12	254,025.050	Sub Bag TU UPT Lab					
					1 Pengelolaan Kearsipan Dinas		bulan	-	12	25,000	12	25,250	12	25,502.5	12	25,502.5	12	25,757.525	12							
					2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas		bulan	-	12	25,000	12	25,250	12	25,502.5	12	25,502.5	12	25,757.525	12							
					10 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan	paket	0	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020	1	374,072.200	5	1,184,112.200						
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Paket	-	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020	1	374,072,200	5							
					11 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	bulan	12	12	400,000	12	404,000	12	422,789	12	427,016.89	12	431,287.059	12	2,085,092.949						
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		bulan	12.00	12	100,000	12	100,000	12	105,000	12	108,000.00	12	109,000.000	12							
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		bulan	12.00	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000.00	12	102,000.000	12							
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium		unit	-	52	200,000	0	204,000	0	217,789	0	219,016.89	0	220,287.059	52							
					12 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	bulan	0	12	500,000	12	505,000	12	610,050	12	610,050.00	12	616,150.500	12	2,841,250.500						
					1 Operasional Perkantoran		bulan	12.00	12	140,000	12	140,000	12	175,000	12	175,000	12	175,000	12							
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai		bulan	12.00	12	125,000	12	130,000	12	150,000	12	150,000	12	150,000	12							
					3 Penyediaan Bahan Cetak		bulan	12.00	12	45,000	12	45,000	12	54,050	12	54,050	12	54,050	12							
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		bulan	12.00	12	80,000	12	80,000	12	90,000	12	90,000	12	90,000	12							
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		bulan	12.00	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12	40,000	12							
					6 Penyediaan BBM		bulan	12.00	12	40,000	12	40,000	12	65,000	12	65,000	12	65,000	12							
					7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		bulan	12.00	12	30,000	12	30,000	12	36,000	12	36,000	12	36,000	12							
					13 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	bulan	12	12	130,000	12	131,300	12	132,613	12	132,613.00	12	133,939.130	12	660,465.130						
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		bulan	12	12	70,000	12	71,000	12	71,000	12	71,000	12	71,000.000	12							
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		bulan	12	12	60,000	12	60,300	12	61,613	12	61,613	12	62,939.130	12							
					14 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK	paket	1	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020.00	1	206,060.200	5	1,016,100.200						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)		A/N S	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI				
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)						
					3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	5	6	8	2	3																18	19		
					Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	-	1	100,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020	1	206,060,200	5						
					15 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor	paket	-	1	100,000	0		0		0		0			1					
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai PPTK	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12	12	300,000	12	303,000	12	306,030	12	306,030	12	309,090,300	12	1,524,150,300					
					16 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	12	12	225,000	12	225,000	12	225,000	12	225,000	12	225,000,000	12						
					Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK	1 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	12	12	400,000	12	404,000	12	458,040	12	462,620,40	12	467,246,604	12	2,191,907,004					
					2 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN	bulan	12	12	30,000	12	30,000	12	50,000	12	50,000,00	12	53,000,000	12							
					3 Operasional kantor tidak tetap	bulan	12	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000,00	12	100,000,000	12							
					4 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	12	12	3,700	12	3,700	12	5,000	12	5,000,00	12	6,000,000	12							
					5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	12	12	28,000	12	28,000	12	30,000	12	30,000,00	12	30,000,000	12							
					6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	12	12	10,000	12	10,000	12	15,000	12	19,000,00	12	19,000,000	12							
					7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	12	12	100,000	12	104,000	12	123,040	12	123,620,40	12	124,246,604	12							
					8 Penyediaan BBM	bulan	12	12	28,300	12	28,300	12	35,000	12	35,000,00	12	35,000,000	12							
					17 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	Terikasnanya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PPTK	bulan	12	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010,00	12	103,030,100	12	508,050,100					
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12	50,000	12	51,000	12	51,010	12	51,010	12	52,030,100	60							
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12	50,000	12	50,000	12	51,000	12	51,000	12	51,000,000	60							
					18 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	paket	0	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	186,497,96	1	188,362,940	5	980,880,900					
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	-	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	186,497,96	1	188,362,940	5							
					19 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	bulan	0	12	150,000	12	151,500	12	153,015	12	153,015,00	12	154,545,150	12	762,075,150					
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	0	12	75,000	12	76,500	12	77,015	12	77,015	12	77,545,150	12							
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	0	12	75,000	12	75,000	12	76,000	12	76,000	12	77,000,000	12							
					20 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-PSC	bulan	0	12	350,000	12	353,500	12	407,035	12	411,105,35	12	415,216,404	12	1,936,856,754					
					1 Operasional kantor Tidak tetap	bulan	0	12	127,000	12	130,500	12	140,000	12	140,000,00	12	142,000,00	12							
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	0	12	48,000	12	48,000	12	55,035	12	55,105,00	12	55,216,10	12							
					3 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	0	12	21,000	12	21,000	12	30,000	12	31,000,00	12	32,000,00	12							
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	0	12	40,000	12	40,000	12	50,000	12	51,000,00	12	51,000,00	12							
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	0	12	3,000	12	3,000	12	5,000	12	7,000,00	12	7,000,00	12							
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	bulan	0	12	65,000	12	65,000	12	77,000	12	77,000,35	12	77,000,35	12							
					7 Penyediaan BBM	bulan	0	12	46,000	12	46,000	12	50,000	12	50,000,00	12	51,000,00	12							
					21 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terikasnanya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Daerah	bulan	0	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010,00	12	103,030,100	12	508,050,100					
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	0	12	50,000	12	51,000	12	51,010	12	51,010	12	52,010,100	12							
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	0	12	50,000	12	50,000	12	51,000	12	51,000	12	51,020,000	12							
					22 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-LT	paket	0	1	350,000	1	353,500	1	357,035	1	357,035,00	1	360,605,350	1	1,778,175,350					
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	-	1	350,000	1	353,500	1	357,035	1	357,035	1	360,605	5							
					23 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW	bulan	0	12	200,000	12	202,000	12	204,020	12	206,060,200	12	208,120,800	12	1,020,201,000					
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	-	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	103,030,100	12	104,060,400	12							
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	-	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	103,030,100	12	104,060,400	60							
					24 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-LT	bulan	0	12	400,000	12	404,000	12	408,040	12	412,120,400	12	416,241,604	12	2,040,402,004					
					1 Operasional kantor Tidak tetap	bulan	-	12	52,000	12	52,000	12	52,000	12	56,080,400	12	60,201,604	12							
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	-	12	63,000	12	63,000	12	63,000	12	63,000,000	12	63,000,000	12							
					3 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	-	12	31,000	12	31,000	12	31,000	12	31,000,000	12	31,000,000	12							
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan		12	92,000	12	92,000	12	92,000	12	92,000,000	12	92,000,000	12							
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	-	12	4,000	12	8,000	12	12,040	12	12,040,000	12	12,040,000	12							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACK)	Kod e PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM ( OUTCOME)		A/N S	BASE LINE	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR RENSTRA	UNIT PELAKSANA	LOKASI					
					INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)				2017		Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)							
					3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	5	6	8	2	3			4												18	19				
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		bulan	-	12	79,000	12	79,000	12	79,000	12	79,000.000	12	79,000.000	12							
					7 Penyediaan BBM		bulan	-	12	79,000	12	79,000	12	79,000	12	79,000.000	12	79,000.000	12							
			25	Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		bulan	0	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010.000	12	103,030.100	12	508,050.100						
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		bulan	-	12	50,000	12	51,000	12	51,010	12	51,010	12	52,010.100	12							
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		bulan	-	12	50,000	12	50,000	12	51,000	12	51,000	12	51,020.000	12							
			26	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada BP-TAHURA	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BP-TAHURA		paket	1	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020.000	1	206,060.200	5	1,016,100.200						
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		paket	1	1	200,000	1	202,000	1	204,020	1	204,020.000	1	206,060,200	5							
			27	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BP-TAHURA	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BP-TAHURA		bulan	12	12	250,000	12	252,500	12	255,025	12	257,575.250	12	260,151.003	12	1,275,251.253						
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		bulan	12	12	150,000	12	152,500	12	155,025	12	155,075.250	12	155,075.250	12							
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		bulan	12	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	102,500.000	12	105,500.000	12							
			28	Kegiatan Pembydaian Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BP-TAHURA		bulan	12	12	300,000	12	303,000	12	306,030	12	309,090.300	12	312,181.203	12	1,530,301.503						
					1 Operasional kantor Tidak tetap		bulan	12	12	223,000	12	223,000	12	223,000	12	226,000.000	12	226,090.000	12							
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai		bulan	12	12	14,000	12	17,000	12	20,000	12	20,060.300	12	20,061.203	12							
					3 Penyediaan Bahan Cetak		bulan	12	12	3,000	12	3,000	12	3,000	12	3,000.000	12	3,000.000	12							
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		bulan	12	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000.000	12	20,000.000	12							
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		bulan	12	12	4,000	12	4,000	12	4,000	12	4,000.000	12	7,000.000	12							
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		bulan	12	12	26,000	12	26,000	12	26,030	12	26,030.000	12	26,030.000	12							
					7 Penyediaan BBM		bulan	12	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000.000	12	10,000.000	12							
			29	Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BP-TAHURA		bulan	12	12	100,000	12	101,000	12	102,010	12	102,010.000	12	103,030.100	12	508,050.100						
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		bulan	12	12	50,000	12	51,000	12	51,010	12	51,010	12	52,010.100	12							
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		bulan	12	12	50,000	12	50,000	12	51,000	12	51,000	12	51,020.000	12							
		JUMLAH PAGU TOTAL								36,805,100.00		37,269,100.00		39,557,300.00		39,215,400.00		38,399,200.00		191,246,100.00						

Sub Bag TU  
TAHURA



## PROVINSI BANTEN

**TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
PERIODE : 2017-2022**



## PROVINSI BANTEN

### KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1.1 Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1.1.1 Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja
5	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	5.1 Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	5.1.1 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas 5.1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES



## PROVINSI BANTEN

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

MISI : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
1.1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1.1.1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	1.1	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.1	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

**MISI : 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
5.1	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	5.1.1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas		5.1	Menurunkan pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas udara dan air sungai serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	
		5.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan		5.2	Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung melalui Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan DAS, Konservasi SDA dan Ekosistem serta Pemberdayaan Masyarakat	
			5.3 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung		5.3	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan	

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

**Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES**



PROVINSI BANTEN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Keterangan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	1.1 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetaikannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	1 Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	60.0 Nilai	90.0 Nilai	1205.0 Program Tata Kelola Pemerintahan 1	Lingkungan Hidup	
5.1.1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	5.1 Mendorong peningkatan kualitas air dan udara melalui Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 , pengendalian pencemaran dan kerusakan , pemeliharaan lingkungan hidup, Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Penegakan Hukum	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67 %	46.17 %	1205.1 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5	Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, UPT LAB
5.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	5.2 Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, aneka usaha dan promosi kehutanan, pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat  5.3 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6 %	33.21 %	2004.1 Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 5	Kehutanan	Program yang dilaksanakan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW, BPPTK

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES



**PROVINSI BANTEN**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**PERIODE : 2017-2022**

**SATKER : 120501** Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
12	20	Lingkungan Hidup			29.061.100.000		29.370.200.000		31.134.200.000		30.904.000.000		30.515.000.000		150.984.500.00			
12	20	01	Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM (Satuan:	2,50	2,80	15.918.800.000	3,00	15.965.100.000	3,20	16.839.500.000	3,40	16.798.800.000	3,60	17.134.800.000	3,60		
12	20	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Air	51,00	51,50	13.142.300.000	52,00	13.405.100.000	52,50	14.294.700.000	53,00	14.105.200.000	53,50	13.380.200.000	53,50	82.657.000.000	
				2 Indeks Kualitas Udara	58,80	59,00		59,20		59,40		59,60		59,80		59,80		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, UPT LAB
				3 Peningkatan Peran	203,00	52,00		60,00		68,00		76,00		78,00		281,00		
20		Urusan Pilihan																
20	00	Kehutanan			7.744.000.000		7.898.900.000		8.423.100.000		8.311.400.000		7.884.200.000		40.261.600.000			
20	00	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1 Luas Lahan kritis yang Konservasi Hutan	69.466,00	5.000,00	7.744.000.000	5.000,00	7.898.900.000	5.000,00	8.423.100.000	5.000,00	8.311.400.000	5.000,00	7.884.200.000	94.466,00	68.327.500.000	Program yang dilaksanakan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW, BPPTK
				2 Persentase	38,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		48,00		

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES



## PROVINSI BANTEN

### PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	1 Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	1205.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	2.5 Skala (1-4)	2,80		3,00		3,20		3,40		3,60		3,60				
			1205.120501.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22 dokumen	22,00	75.000.000,00	22,00	75.000.000,00	22,00	75.750.000,00	22,00	75.750.000,00	22,00	76.507.500,00	110,00	378.007.500,00			
					1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 dokumen	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		85,00		
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 dokumen	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		
			1205.120501.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	17 dokumen	16,00	300.000.000,00	16,00	300.000.000,00	16,00	303.000.000,00	16,00	303.000.000,00	16,00	306.030.000,00	81,00	1.512.030.000,00			
					1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 dokumen	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 dokumen	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		45,00		
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00		
					4 Penyusunan Renstra	1 dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		
			1205.120501.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 Paket	1,00	300.000.000,00	1,00	303.000.000,00	1,00	306.030.000,00	1,00	199.970.000,00	1,00	201.969.700,00	5,00	1.310.969.700,00			
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
			1205.120501.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				2.213.800.000,00		2.213.800.000,00		2.435.938.000,00		2.435.938.000,00		2.460.297.380,00		11.759.773.380,00			

			1205.120501.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan	12 Aparatur	12,00	5.500.000.000,00	12,00	5.472.500.000,00	12,00	5.827.225.000,00	12,00	5.885.497.250,00	12,00	5.944.352.223,00	12,00	28.629.574.473,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	12 Aparatur	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					8 Dst	0 Aparatur	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1205.120501.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 Meningkatnya Kapasitas Aparatur	173 Orang	173,00	200.000.000,00	173,00	202.000.000,00	173,00	204.020.000,00	173,00	204.020.000,00	173,00	206.060.200,00	173,00	1.016.100.200,00		
					1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaiuan	173 Aparatur	173,00		173,00		173,00		173,00		173,00		173,00			
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	173 Aparatur	173,00		173,00		173,00		173,00		173,00		173,00			
					3 dst	0 Aparatur	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 Bulan	12,00	1.900.000.000,00	12,00	1.919.000.000,00	12,00	1.938.190.000,00	12,00	1.938.190.000,00	12,00	1.957.571.900,00	12,00	9.652.951.900,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	0 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	12 Bulan	12,00	50.000.000,00	12,00	50.500.000,00	12,00	51.005.000,00	12,00	51.005.000,00	12,00	51.515.050,00	12,00	254.025.050,00		
					1 Pengelolaan Kearsipan Dinas	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	0 Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	3 Dokumen	5,00	450.000.000,00	5,00	450.000.000,00	5,00	454.500.000,00	5,00	454.500.000,00	5,00	459.045.000,00	25,00	2.268.045.000,00		
					1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	0 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					3 pengelolaan PPID	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					4 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					5 TEMATIK Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial	0 Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					6 dst	0 Dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.010	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan	0 Paket	1,00	200.000.000,00	1,00	202.000.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	374.072.200,00	5,00	1.184.112.200,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					2 dst	0 Paket	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	400.000.000,00	12,00	404.000.000,00	12,00	422.789.000,00	12,00	427.016.890,00	12,00	431.287.059,00	12,00	2.085.092.949,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 dst	12 bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	

			1205.120501.01.012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Bulan	12,00	500.000.000,00	12,00	505.000.000,00	12,00	610.050.000,00	12,00	610.050.000,00	12,00	616.150.500,00	12,00	2.841.250.500,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					8 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.013	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Bulan	12,00	130.000.000,00	12,00	131.300.000,00	12,00	132.613.000,00	12,00	132.613.000,00	12,00	133.939.130,00	12,00	660.465.130,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.014	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK	0 Paket	1,00	200.000.000,00	1,00	202.000.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	206.060.200,00	5,00	1.016.100.200,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00	
					2 dst	0 Paket	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.015	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terpeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai PPTK	0 Bulan	12,00	300.000.000,00	12,00	303.000.000,00	12,00	306.030.000,00	12,00	306.030.000,00	12,00	309.090.300,00	12,00	1.524.150.300,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			1205.120501.01.016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK	0 Bulan	12,00	400.000.000,00	12,00	404.000.000,00	12,00	458.040.000,00	12,00	462.620.400,00	12,00	467.246.604,00	12,00	2.191.907.004,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
			1205.120501.01.017	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PPTK	0 Bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	101.000.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	103.030.100,00	12,00	508.050.100,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
					3 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

			1205.120501.01.018	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-LT	0 Paket	1,00	350.000.000,00	1,00	353.500.000,00	1,00	357.035.000,00	1,00	357.035.000,00	1,00	360.605.350,00	5,00	1.778.175.350,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
					2 dst	0 Paket	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1205.120501.01.019	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-LT	0 Bulan	12,00	200.000.000,00	12,00	202.000.000,00	12,00	204.020.000,00	12,00	206.060.200,00	12,00	208.120.800,00	12,00	1.020.201.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1205.120501.01.020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-LT	0 Bulan	12,00	400.000.000,00	12,00	404.000.000,00	12,00	408.040.000,00	12,00	412.120.400,00	12,00	416.241.604,00	12,00	2.040.402.004,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					8 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1205.120501.01.021	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPHW-LT	0 Bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	101.000.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	103.030.100,00	12,00	508.050.100,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1205.120501.01.022	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 Paket	1,00	200.000.000,00	1,00	202.000.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	186.497.960,00	1,00	188.362.940,00	5,00	980.880.900,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
					2 dst	0 Paket	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			1205.120501.01.023	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 Bulan	12,00	150.000.000,00	12,00	151.500.000,00	12,00	153.015.000,00	12,00	153.015.000,00	12,00	154.545.150,00	12,00	762.075.150,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
					3 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			1205.120501.01.024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Bulan	12,00	350.000.000,00	12,00	353.500.000,00	12,00	407.035.000,00	12,00	411.105.350,00	12,00	415.216.404,00	12,00	1.936.856.754,00			
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					8 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			1205.120501.01.025	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPWH-PSC	0 Bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	101.000.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	103.030.100,00	12,00	508.050.100,00			
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					3 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.01.026	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BP-TAHURA	0 Paket	1,00	200.000.000,00	1,00	202.000.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	204.020.000,00	1,00	206.060.200,00	5,00	1.016.100.200,00			
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
					2 Dst	0 Paket	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.01.027	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terpeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BP-TAHURA	0 Bulan	12,00	250.000.000,00	12,00	252.500.000,00	12,00	255.025.000,00	12,00	257.575.250,00	12,00	260.151.003,00	12,00	1.275.251.253,00			
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					3 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.01.028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada BP-TAHURA	0 Bulan	12,00	300.000.000,00	12,00	303.000.000,00	12,00	306.030.000,00	12,00	309.090.300,00	12,00	312.181.203,00	12,00	1.530.301.503,00			
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					8 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			1205.120501.01.029	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BP-TAHURA	0 Bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	101.000.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	102.010.000,00	12,00	103.030.100,00	12,00	508.050.100,00			
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00				
					3 Dst	0 Bulan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Air	51 Nilai	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50		53,50				
					2 Indeks Kualitas Udara	58.8 Nilai	59,00		59,20		59,40		59,60		59,80		59,80				
					3 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok/Lembaga	52,00		60,00		68,00		76,00		78,00		281,00				
			1205.120501.15.001	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	0 Terlaksannya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	100 %	100,00	2.907.657.000,00	100,00	2.962.031.000,00	100,00	3.143.520.000,00	100,00	2.472.535.000,00	100,00	2.228.998.500,00	100,00	13.714.741.500,00			
					1 Pemantauan kualitas air sungai	3 sungai	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
					2 Pemantauan kualitas udara	22 lokasi	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00		22,00				
					3 Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	0 dok	4,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		8,00		
					4 Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	40 industri	120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		600,00				
					5 Pemantauan kerusakan lingkungan	0 lokasi	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		50,00		
					6 dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.15.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	0 Tersusunnya dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan limbah B3	100 %	100,00	1.303.764.000,00	100,00	1.340.012.000,00	100,00	1.459.100.000,00	100,00	1.554.000.000,00	100,00	1.478.200.000,00	100,00	7.135.076.000,00			
					1 Penyusunan kebijakan dan strategi dalam penanganan sampah	0 dok	1,00		1,00		1,00		2,00		2,00		2,00		7,00		
					2 kerjasama pengelolaan sampah	0 dok	1,00		2,00		1,00		2,00		2,00		8,00				
					3 penerbitan pertimbangan teknis izin/rekomendasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3	15 izin	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00		
					4 pemantauan dan pembinaan terhadap pengelola limbah B3	40 industri	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					5 dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			1205.120501.15.003	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	0 Terlaksannya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah	100 %	100,00	2.355.646.000,00	100,00	2.410.018.000,00	100,00	2.596.080.000,00	100,00	1.353.665.000,00	100,00	1.264.099.500,00	100,00	9.979.508.500,00			
					1 update data dan informasi keanekaragaman hayati	0 dok	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
					2 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 lokasi	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		40,00		
					3 pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	0 lokasi	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		50,00		
					4 Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten	0 unit	1,00		0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00		
					5 Pembinaan kampung iklim terpadu	16 kp	24,00		32,00		40,00		48,00		50,00		50,00		50,00		
					6 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK sektor limbah	1 lap	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
					7 dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.15.004	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	0 Tersusunnya KLHS dan NSDA /KLH/SLHD tingkat provinsi	100 %	100,00	1.353.764.000,00	100,00	1.390.012.000,00	100,00	1.514.000.000,00	100,00	1.545.000.000,00	100,00	1.265.500.000,00	100,00	7.068.276.000,00			
					1 Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	1 dok	1,00		0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		
					2 Penyusunan dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 dok	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
					3 penyusunan NSDA/IKLH/SLHD	1 dok	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		
					4 Penilaian mutu Dokumen Lingkungan Hidup oleh KPA Provinsi	40 %	44,00		46,00		48,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
					5 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			1205.120501.15.005	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	0 Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan LH serta pengawasan thd usaha yang memiliki ijin Lingkungan	100 %	100,00	1.351.882.000,00	100,00	1.370.006.000,00	100,00	1.432.000.000,00	100,00	1.840.000.000,00	100,00	1.763.000.000,00	100,00	7.756.888.000,00			
					1 Prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100 %	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
					2 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200 industri	290,00		310,00		330,00		350,00		350,00		350,00				
					3 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			1205.120501.15.006	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	0 Terlaksananya pembinaan pada sekolah, pemerhati lingkungan dan MHA serta penilaian kota berwawasan lingkungan	100 %	100,00	1.495.823.000,00	100,00	1.523.009.000,00	100,00	1.616.000.000,00	100,00	1.760.000.000,00	100,00	1.730.000.000,00	100,00	8.124.832.000,00			
					1 Pembinaan peduli dan berbudaya lingkungan Sekolah	129 sekolah	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		125,00		
					2 Pembinaan dan penilaian Kota berwawasan lingkungan di provinsi Banten	3 kota	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
					3 Pembinaan pada pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat	5 kelompok	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		
					4 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.15.007	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	0 Terlaksananya pembinaan jaminan mutu Laboratorium Lingkungan melalui Uji Profisiensi sebanyak 40 parameter	100 %	100,00	991.882.000,00	100,00	1.010.006.000,00	100,00	1.072.000.000,00	100,00	1.465.000.000,00	100,00	1.510.402.000,00	100,00	6.049.290.000,00			
					1 Jumlah Parameter Uji Profisiensi sebanyak 40 parameter Sampai dengan 2022	0 parameter	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		40,00		
					2 Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan	3 kali	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		
					3 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			1205.120501.15.008	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	0 Terlaksananya pembinaan pengujian dan analisa laboratorium lingkungan melalui uji dan analisa samle uji	100 %	100,00	1.381.882.000,00	100,00	1.400.006.000,00	100,00	1.462.000.000,00	100,00	2.115.000.000,00	100,00	2.140.000.000,00	100,00	8.498.888.000,00			
					1 Jumlah Pengujian dan Analisa Sample Uji	0 sample	144,00		174,00		204,00		234,00		234,00		234,00		234,00		
					2 Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	3 kali	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		
					3 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1 Luas Lahan kritis yang terelabilitasi	69466 Hektar	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		94.466,00				
					2 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	38 %	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		48,00				
			2004.120501.15.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pemantapan kawasan hutan	100 %	100,00	420.000.000,00	100,00	727.714.000,00	100,00	747.150.000,00	100,00	743.034.000,00	100,00	727.210.000,00	100,00	3.365.108.000,00			
					1 Perencanaan kehutanan	2 dok	5,00		6,00		5,00		4,00		4,00		24,00				
					2 Pemantapan kawasan hutan	6 KPH	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		
					3 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.15.002	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	0 Terlaksananya penatausahaan hasil hutan yang lestari	100 %	100,00	535.500.000,00	100,00	820.582.000,00	100,00	839.996.000,00	100,00	835.860.000,00	100,00	820.036.000,00	100,00	3.851.974.000,00			
					1 Terwujudnya Kelompok Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat berbasis industri	15 kelompok	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00				
					2 Tertibnya penatausahaan hasil hutan	180 industri	180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		180,00		
					3 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.15.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	0 Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan	100 %	100,00	430.500.000,00	100,00	589.432.000,00	100,00	618.553.000,00	100,00	612.348.000,00	100,00	588.613.000,00	100,00	2.839.446.000,00			
					1 pengembangan aneka usaha kehutanan	36 kelompok usaha	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00				
					2 pengembangan kawasan bambu terpadu	0 kawasan	0,30		0,50		0,70		0,90		0,90		0,90		0,90		
					3 Promosi aneka usaha kehutanan	2 kegiatan	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		15,00		
					4 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.15.004	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Terlaksananya pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	100 %	100,00	493.500.000,00	100,00	451.897.000,00	100,00	500.432.000,00	100,00	490.087.000,00	100,00	450.532.000,00	100,00	2.386.448.000,00			
					1 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan	3 dok	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00				
					2 Peningkatan luas lahan yang terelabilitasi	0 ha	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		5.000,00				
					3 Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS	0 DAS	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		5,00		
					4 Peningkatan luas ruang terbuka hijau (RTH)	29 Unit	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
					5 Pembentukan dan pembinaan forum DAS	5 Forum	5,00		6,00		6,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
					6 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



			2004.120501.15.007	Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	100 %	100,00	1.102.500.000,00	100,00	1.213.537.000,00	100,00	1.252.365.000,00	100,00	1.244.089.000,00	100,00	1.212.445.000,00	100,00	6.024.936.000,00			
					1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 ha	1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		6.250,00		
					2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	0 Kelompok	17,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		97,00		
					3 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	32 Industri	32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		
					4 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Penangkar/Pengedar	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
					5 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.15.008	Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon	100 %	100,00	728.700.000,00	100,00	809.025.000,00	100,00	847.853.000,00	100,00	839.577.000,00	100,00	807.933.000,00	100,00	4.033.088.000,00			
					1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 ha	750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		3.750,00		
					2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	5 Kelompok	8,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		44,00		
					3 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	81,00		81,00		81,00		81,00		81,00		81,00		81,00		
					4 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	5 Penangkar/Pengedar	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		50,00		
					5 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.15.009	Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak	100 %	100,00	1.633.000.000,00	100,00	702.787.000,00	100,00	741.615.000,00	100,00	733.339.000,00	100,00	701.695.000,00	100,00	4.512.436.000,00			
					1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 ha	1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00		9.750,00		
					2 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Kelompok	21,00		21,00		21,00		23,00		23,00		23,00		109,00		
					3 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	20 Industri	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
					4 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.15.010	Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang	100 %	100,00	203.700.000,00	100,00	194.997.000,00	100,00	224.118.000,00	100,00	217.911.000,00	100,00	194.178.000,00	100,00	1.034.904.000,00			
					1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 ha	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		250,00		
					2 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		82,00		
					3 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Penangkar/Pengedar	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
					4 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

			2004.120501.15.011	Pengembangan Pemberian Tanaman Hutan	0 Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan	100 %	100,00	262.500.000,00	100,00	310.896.000,00	100,00	369.138.000,00	100,00	356.724.000,00	100,00	309.258.000,00	100,00	1.608.516.000,00		
					1 Jumlah Ketersediaan Bibit Tanaman Kehutanan	145000 bibit	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		1.000.000,00			
					2 Jumlah Penelusuran Sumber Benih unggul	0 jenis	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00			
					3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan tanaman kehutanan	0 orang	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		400,00			
					4 Jumlah Identifikasi jenis tanaman endemik Banten	0 dokumen	0,00		1,00		0,00		1,00		1,00		3,00			
					5 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman kehutanan unggul	0 ha	3,00		3,00		4,00		5,00		5,00		6,00			
					6 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS	8 Kab/Kota	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
					7 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			2004.120501.15.012	Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	0 Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	100 %	100,00	95.550.000,00	100,00	116.730.000,00	100,00	165.265.000,00	100,00	154.920.000,00	100,00	115.365.000,00	100,00	647.830.000,00		
					1 Pembinaan Pengada Pengedar Bibit Tanaman Hutan	11 orang/pengelola	26,00		30,00		35,00		40,00		40,00		40,00			
					2 Pengawasan Benih Tanaman Hutan	0 benih	4,00		5,00		6,00		7,00		7,00		7,00			
					3 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Hutan dan MPTS	0 batang	500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		42.500,00			
					4 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	0 orang	4,00		5,00		6,00		7,00		7,00		7,00			
					5 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan	0 unit	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
					6 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			2004.120501.15.013	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA	100 %	100,00	861.000.000,00	100,00	837.918.000,00	100,00	867.039.000,00	100,00	860.832.000,00	100,00	837.099.000,00	100,00	4.263.888.000,00		
					1 Terciptanya Perlindungan kawasan TAHURA	5 %	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		25,00			
					2 Terrehabilitasinya Kawasan TAHURA	200 ha	32,00		32,00		32,00		32,00		32,00		160,00			
					3 Tersedianya koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punah	0 Species	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
					4 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

			2004.120501.15.014	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata	100 %	100,00	256.200.000,00	100,00	278.535.000,00	100,00	297.949.000,00	100,00	293.811.000,00	100,00	277.989.000,00	100,00	1.404.484.000,00		
					1 Terwujudnya peningkatan kunjungan TAHURA Banten	26000 Orang	35.000,00		39.500,00		44.000,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00			
					2 Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata	2 Unit	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00	
					3 Dst	0 0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			2004.120501.15.015	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)	0 terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial	0 %	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
					1 pengembangan hutan rakyat	0 hektar	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.500,00	
					2 penghijauan lingkungan (MPTS)	0 batang	10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		10.500,00		52.500,00	
					3 pengembangan komoditas unggulan tanaman kehutanan	0 hektar	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		30,00	

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

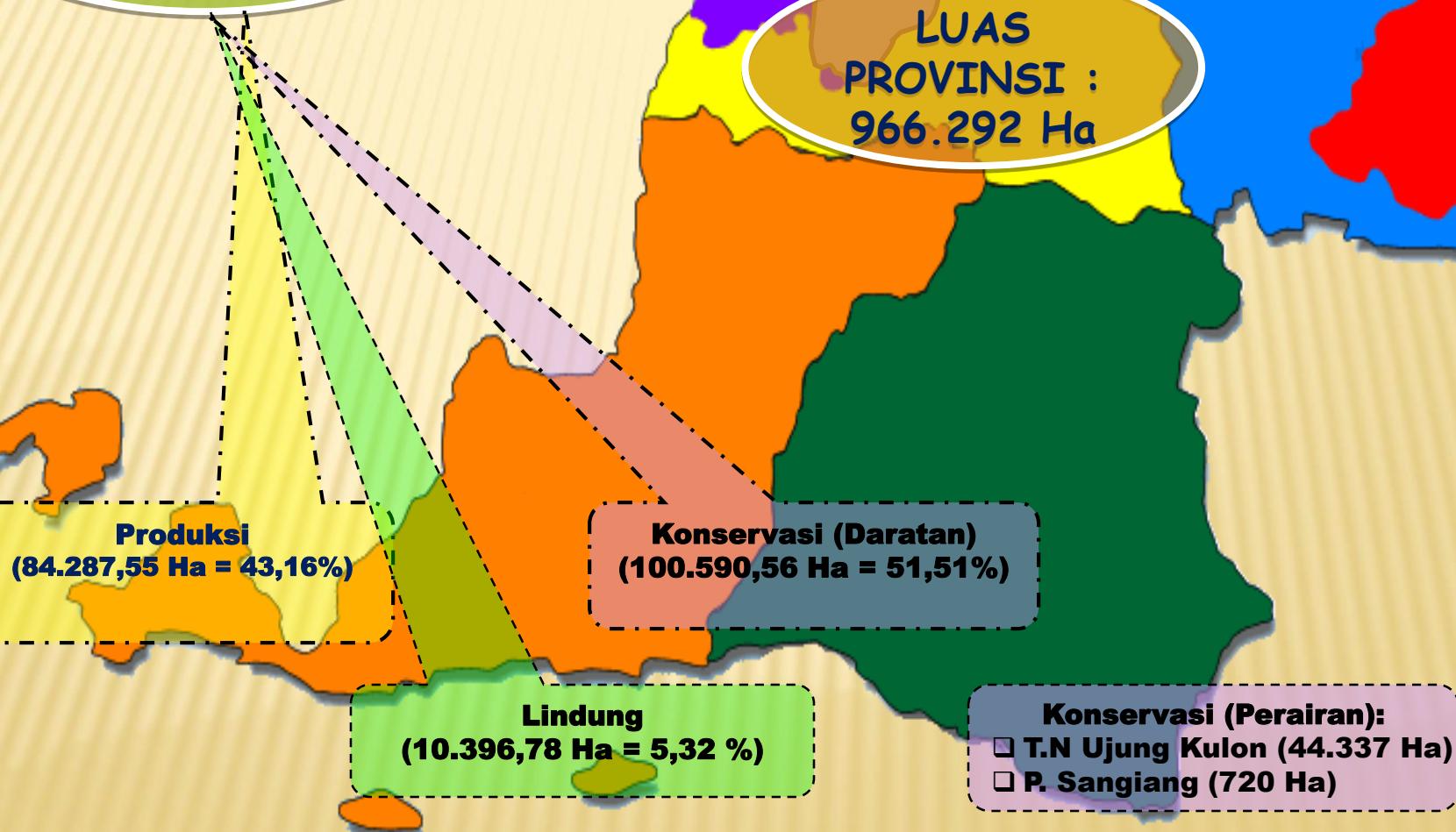
Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES

# KAWASAN HUTAN PROVINSI BANTEN (SK PENETAPAN PARSIAL KAWASAN HUTAN)



**Kawasan Hutan  
Prov.Banten  
(195.274,89 Ha)  
(20,21 %)**

**LUAS  
PROVINSI :  
966.292 Ha**



# DATA LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN SK PENETAPAN PARSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

No	Fungsi Kawasan Hutan/Lokasi	Luas (Ha)	%	Dasar Yuridis SK Penetapan Parsial
<b>A.</b>	<b>Hutan Konservasi</b>	<b>100.590,56</b>	<b>51,51</b>	
1	Taman Nasional Ujung Kulon - Daratan - Perairan Laut*)	61.357,46 44.337,00		SK. 3658/Menhet-VII/KUH/2014 SK. 3658/Menhet-VII/KUH/2014
2	Taman Nasional Gn. Halimun Salak (TNGHS)	32.014,00		SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (SK Perubahan Fungsi)
3	CA Rawa Danau	3.542,70		SK. 3586/Menhet-VII/KUH/2014
4	CA Gn. Tukung Gede	1.519,50		SK. 3622/Menhet-VII/KUH/2014
5	CA Pulau Dua	32,85		SK. 3107/Menhet-VII/KUH/2014
6	TWA P. Sangiang	528,15		55/Kpts-II/93
7	TWA Laut P. Sangiang *)	720,00		698/Kpts-II/1995
8	TAHURA Banten	1.595,90		SK. 3108/Menhet-VII/KUH/2014
<b>B.</b>	<b>Hutan Lindung</b>	<b>10.396,78</b>	<b>5,32</b>	
1	KPH Banten	10.307,28		SK. 3108/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3109/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3110/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3279/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3280/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3282/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3283/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3289/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
2	TNGHS	89,5		SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (SK Perubahan Fungsi)
<b>C.</b>	<b>Hutan Produksi</b>	<b>84.287,55</b>	<b>43,16</b>	
1	<b>KPH Banten</b> - Produksi Terbatas - Produksi Tetap	<b>71.187,53</b> 49.172,15 22.015,38		SK. 3109/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3110/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3279/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3280/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3281/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3282/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 SK. 3283/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016
2	<b>TNGHS</b> - Produksi Terbatas - Produksi Tetap	<b>13.100,02</b> 9.475,52 3.624,50		SK 327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 (SK Perubahan Fungsi)
<b>TOTAL</b>		<b>195.274,89</b>		

\*) Tidak ikut dijumlahkan

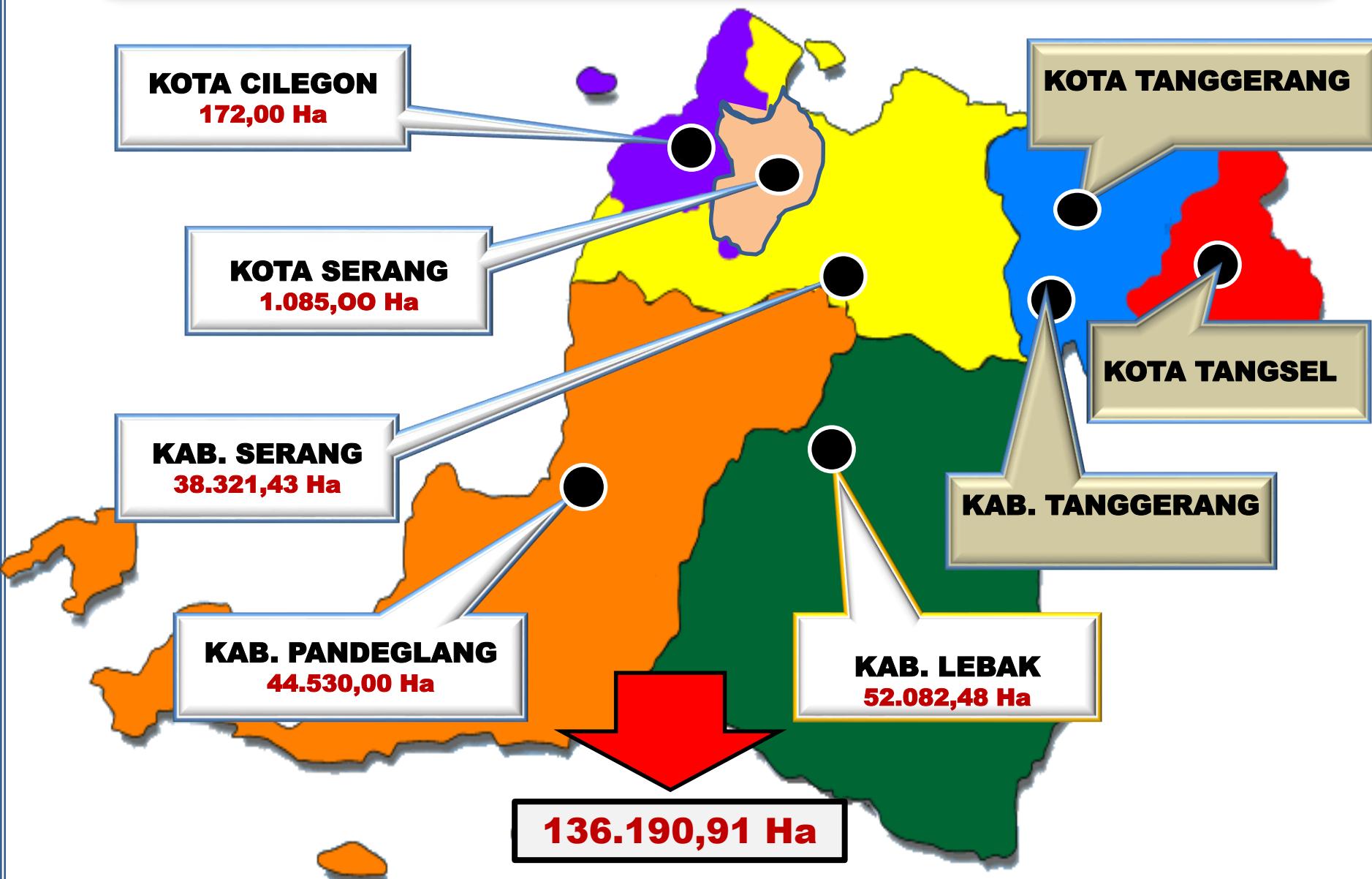
# LUAS KAWASAN HUTAN DAN PROSENTASE FUNGSI KAWASAN

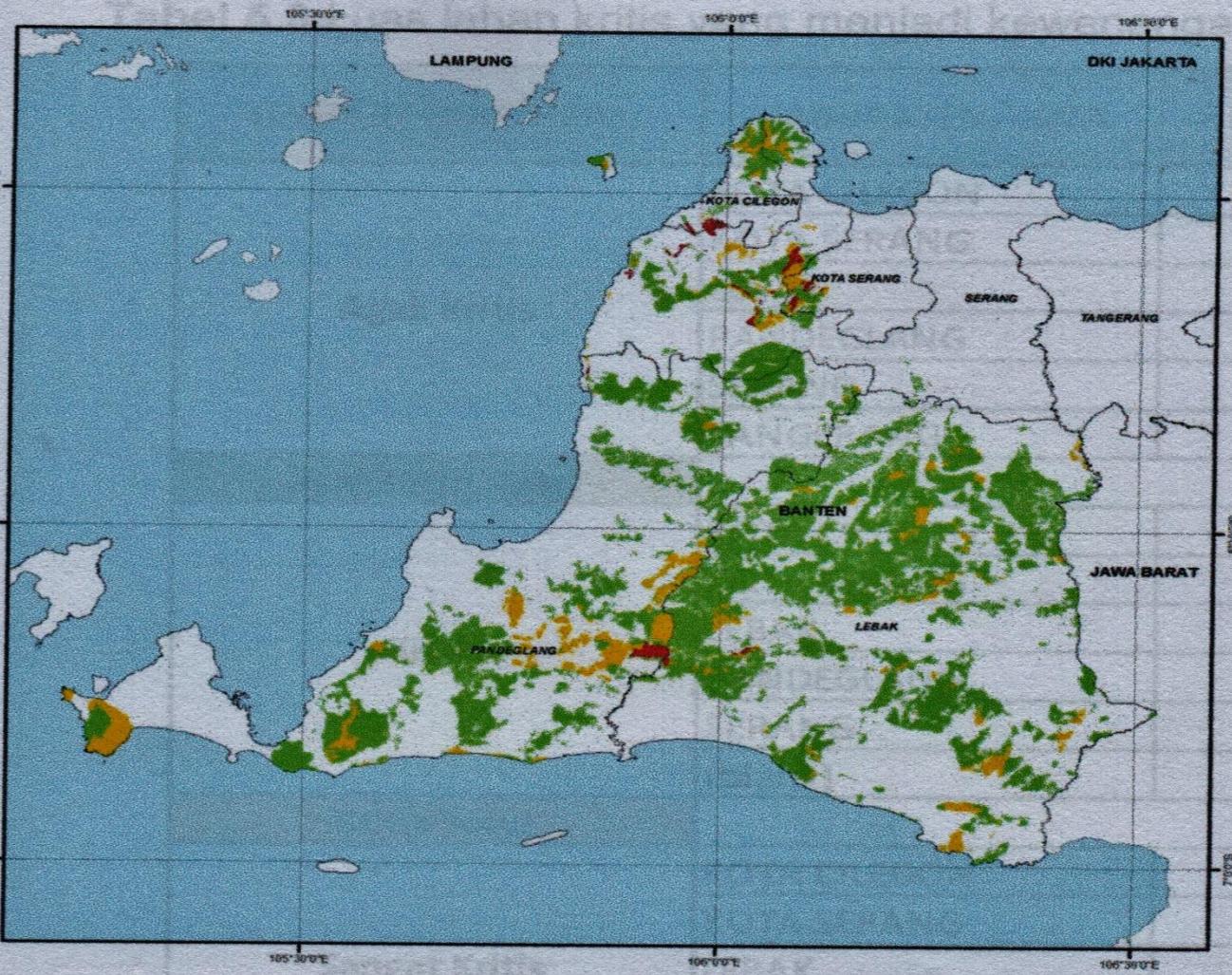
KABUPATEN/KOTA	Luas wilayah <sup>*)</sup>	LUAS KAWASAN HUTAN DARATAN BERDASARKAN FUNGSI <sup>**) </sup>				Luas Hutan	% Hutan
		Konservasi	Lindung	Produksi Terbatas	Produksi Tetap		
Kota Cilegon	17.550,00		479,38		247,23	726,61	4,14
Kab. Tangerang	101.186,00		1.601,60			1.601,60	1,58
Kota Serang	26.671,00	32,85			177,52	210,37	0,79
Lebak	342.656,00	32.014,00	3.327,32	30.652,19	16.890,29	82.883,80	24,19
Pandeglang	274.689,00	62.953,36	4.292,63	7.142,11	26.494,94	100.883,04	36,73
Serang	173.428,00	5.590,35	695,85	1.799,73	894,74	8.980,68	5,18
Kota Tangerang	15.393,00					-	0,00
Kota Tangerang Sel	14.719,00					-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>966.292,00</b>	<b>100.590,56</b>	<b>10.396,78</b>	<b>39.594,03</b>	<b>44.704,72</b>	<b>195.286,09</b>	<b>20,21</b>

<sup>\*)</sup> Berdasarkan Banten Dalam Angka 2015

<sup>\*\*)</sup>  Berdasarkan SK Penetapan Parsial

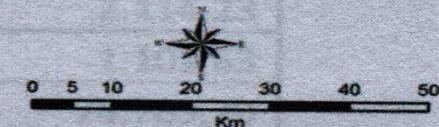
# MAPPING SEBARAN LUAS HUTAN RAKYAT (HR) DI PROVINSI BANTEN





DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI BANTEN

**PETA LAHAN KRITIS  
PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2017**



**KETERANGAN:**

- BATAS KABUPATEN/KOTA
- Lahan Kritis 2017**
- Agak Kritis
- Kritis
- Sangat Kritis

TINGKAT KEKRITISAN	KABUPATEN/KOTA	LUAR HUTAN	FUNGSI KAWASAN HUTAN				JUMLAH
			Konservasi	Lindung	Produksi Terbatas	Produksi Tetap	
<b>Agak Kritis</b>	KOTA CILEGON	2.114,23	263,81	172,33		153,18	2.703,55
	KOTA SERANG	1.101,63				31,11	1.132,74
	LEBAK	74.789,78	7.676,73	1.671,57	8.760,08	4.773,71	97.671,86
	PANDEGLANG	34.862,38	10.208,22	1.740,00	2.858,27	2.774,69	52.443,57
	SERANG	9.177,72	931,93	506,56	1.196,95	194,63	12.007,80
	TANGERANG	20,38					20,38
<b>Agak Kritis Total</b>		<b>122.066,11</b>	<b>19.080,70</b>	<b>4.090,46</b>	<b>12.815,30</b>	<b>7.927,33</b>	<b>165.979,90</b>
<b>Kritis</b>	KOTA CILEGON	382,78	56,96	300,73		80,40	820,87
	KOTA SERANG	624,80				83,82	708,62
	LEBAK	5.683,17	257,02	340,08	1.124,48	259,33	7.664,08
	PANDEGLANG	3.826,68	4.562,68	110,28		4.627,36	13.127,00
	SERANG	2.070,27	156,84	137,28	50,16	313,65	2.728,21
	(blank)		0,00				0,00
<b>Kritis Total</b>		<b>12.587,69</b>	<b>5.033,50</b>	<b>888,38</b>	<b>1.174,64</b>	<b>5.364,56</b>	<b>25.048,77</b>
<b>Sangat Kritis</b>	KOTA CILEGON	268,03					268,03
	KOTA SERANG	317,35				28,55	345,90
	LEBAK	22,81		95,64		96,04	214,49
	PANDEGLANG	33,20	17,14	86,19		675,12	811,65
	SERANG	1.004,19	80,30			16,84	1.101,32
		<b>1.645,58</b>	<b>97,44</b>	<b>181,83</b>		<b>816,54</b>	<b>2.741,39</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>136.299,38</b>	<b>24.211,65</b>	<b>5.160,67</b>	<b>13.989,94</b>	<b>14.108,43</b>	<b>193.770,06</b>

Sumber: Perhitungan Konsultan, 2017

## PIETA KLASIFIKASI DAS PROVINSI BANTEN



A horizontal scale bar with numerical markings at 0, 5, 10, 20, 30, and 40. The segment between 0 and 5 is filled with a dark grey color, while the segments between 5 and 10, 10 and 20, 20 and 30, and 30 and 40 are filled with a light grey color. The label 'Km' is centered below the scale bar.

S.0.9

## KETERANGAN:

## Jalan

- ===== Jalan Tol Nasional
  - ===== Jalan Arteri/Utama
  - ===== Jalan Kolektor
  - ===== Batas Provinsi

6°30'0"S

## Klasifikasi DAS

-  DIPERTAHANKAN  
 DIPULIHKAN

S<sub>110,0</sub> 7°



# DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

